



Laporan Percepatan Pembangunan Papua



PERIODE NOVEMBER 2025



Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Provinsi Papua Barat Daya



Kegiatan-Kegiatan Strategis





PAPUA SEHAT (1)



Selama bulan November 2025, Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan serangkaian kegiatan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) pada sektor kesehatan sebagai bagian dari percepatan implementasi Misi Papua Sehat sesuai arah kebijakan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Kegiatan-kegiatan ini mencerminkan upaya memperkuat layanan kesehatan dasar, meningkatkan respons kegawatdaruratan, menyempurnakan tata kelola fasilitas kesehatan, serta memperkuat sinergi pusat–provinsi–kabupaten/kota dalam pembangunan kesehatan. Adapun highlight kegiatan yang terlaksana antara lain:

- ❑ **Koordinasi Pembentukan dan Integrasi PSC 119 – Kemenkes RI (13–16 November 2025):** Pokja Sehat melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Kesehatan terkait integrasi Layanan Darurat Nasional 112 ke dalam Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan Call Center 119 sebagai bagian dari pengembangan Public Safety Center (PSC) 119 di Papua Barat Daya. Pertemuan ini menghasilkan pemahaman bersama mengenai kebutuhan sarana–prasarana, SDM, jejaring rujukan, serta mekanisme operasional PSC yang sesuai standar nasional. Koordinasi ini memperkuat kapasitas daerah sekaligus menegaskan perlunya sinkronisasi lintas sektor (Kemenkes, Kominfo, BPBD, Dinkes Prov/Kab/Kota) dalam membangun sistem layanan kegawatdaruratan yang terpadu dan adaptif terhadap karakteristik Papua.
- ❑ **Kunjungan Kerja Papua Sehat ke Kabupaten Raja Ampat (18–19 November 2025):** Pada kunjungan ini, Pokja Sehat melakukan evaluasi pelaksanaan program kesehatan berdasarkan indikator Misi Papua Sehat, sekaligus menilai tantangan geografis dan kebutuhan layanan di wilayah kepulauan. Ditemukan bahwa peningkatan akses layanan rujukan masih membutuhkan dukungan sarana transportasi khusus, terutama untuk kasus gawat darurat yang memerlukan rujukan keluar daerah. Hasil dialog dengan Dinas Kesehatan juga memperkuat komitmen daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi peningkatan layanan dan memperkuat koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan fasilitas serta program prioritas kesehatan.
- ❑ **Workshop & Pendampingan Penyusunan Renstra RSUD Raja Ampat (20 November 2025):** Pokja Sehat memfasilitasi workshop awal penyusunan Renstra RSUD Raja Ampat sebagai langkah memperkuat tata kelola dan arah perencanaan jangka menengah rumah sakit. Evaluasi awal menemukan sejumlah kendala operasional dan kebutuhan peningkatan kapasitas manajemen. Pokja Sehat memberikan materi teknis mengenai kerangka penyusunan Renstra agar dokumen dapat disusun selaras dengan SPM, kebijakan nasional, dan target RIPPP, khususnya terkait penguatan layanan rujukan dan standar fasilitas di kabupaten kepulauan.





PAPUA SEHAT (2)



❑ **Sinkronisasi–Koordinasi–Evaluasi Papua Sehat di Kabupaten Tambrau (24 November 2025):** Dalam kegiatan ini, Pokja Sehat menemukan perlunya penguatan koordinasi terkait stok logistik kesehatan serta penyusunan perencanaan layanan yang mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat. Temuan lapangan juga menunjukkan perlunya peningkatan sistem pengawasan dan pembaruan data kesehatan untuk mendukung perencanaan berbasis bukti. Kegiatan ini memperkuat komitmen Pemkab Tambrau dan membuka ruang untuk pelaksanaan evaluasi berkala bersama BP3OKP.

❑ **Rapat Koordinasi Penugasan Khusus Tenaga Medis & Nakes Papua (26–28 November 2025):** Dalam forum nasional ini, Pokja Sehat berperan sebagai narasumber sekaligus menyampaikan perspektif dan kebutuhan wilayah Papua Barat Daya. Diskusi menggarisbawahi bahwa Papua membutuhkan "special treatment" dalam pengadaan dan distribusi SDM Kesehatan (SDMK) mengingat faktor geografis, keamanan, dan tantangan sosial-kultural. Pertemuan juga menegaskan pentingnya data SDMK yang valid untuk mendorong perencanaan dan penugasan yang efektif. Kegiatan ini menghasilkan kesepahaman pusat–daerah untuk mempercepat pemenuhan SDMK di Papua dan menjadi momentum penting penguatan layanan dasar di wilayah PBD.

❑ Kesimpulan:

Pelaksanaan kegiatan Pokja Papua Sehat selama November 2025 menunjukkan kemajuan signifikan dalam integrasi sistem layanan kegawatdaruratan, penguatan tata kelola fasilitas kesehatan, serta sinkronisasi program antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Melalui evaluasi lapangan, pendampingan teknis, dan forum koordinasi nasional, BP3OKP PBD semakin mempertegas perannya sebagai pengarah utama dalam pembangunan kesehatan di wilayah Papua Barat Daya yang mengacu pada RIPPP. Capaian bulan ini memperkuat fondasi Misi Papua Sehat—mulai dari penyiapan PSC 119, peningkatan kualitas perencanaan RSUD, optimalisasi pelayanan kesehatan di daerah kepulauan dan pegunungan, hingga penguatan mekanisme pemenuhan SDMK di Tanah Papua. Dengan kerja koordinatif yang terstruktur dan berbasis data, Papua Sehat semakin mendekati implementasi program yang lebih merata, responsif, dan berkelanjutan.

PAPUA CERDAS (1)



Selama bulan November 2025, Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan rangkaian kegiatan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) untuk memperkuat tata kelola pendidikan, memperluas akses layanan pendidikan tinggi, dan mendorong percepatan peningkatan kualitas pembelajaran sesuai arah kebijakan Misi Papua Cerdas dalam RIPPP. Berbagai kegiatan dilakukan melalui FGD, pendampingan teknis, monitoring–evaluasi, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi pusat–provinsi–kabupaten/kota pada sektor pendidikan di Papua Barat Daya.

- ❑ **FGD Pendirian Akademi Komunitas Papua Barat Daya (6–8 November 2025):** Pokja Papua Cerdas menghadiri FGD yang membahas pendirian dan revitalisasi Akademi Komunitas (AK) sebagai bagian dari implementasi kebijakan pendidikan vokasi di Papua Barat Daya. Dalam forum ini, dibahas penjelasan teknis mengenai status izin operasional PDD-AKNESS, termasuk kebutuhan validasi data dosen dan lulusan sebagai prasyarat pengaktifan operasional untuk penerimaan mahasiswa baru pada tahun akademik 2026. Diskusi dengan pemangku kepentingan membuka pemahaman bersama mengenai landasan regulasi, kewenangan pemerintah provinsi, dan arah pengembangan pendidikan vokasi sesuai kebutuhan wilayah.
- ❑ **FGD Pendirian Perguruan Tinggi Negeri Papua Barat Daya (7 November 2025):** Pokja Papua Cerdas berpartisipasi dalam forum yang membahas rencana pendirian Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Papua Barat Daya untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan mengurangi disparitas antarwilayah. Forum ini mengidentifikasi kebutuhan kelembagaan, struktur organisasi, kesiapan lahan, serta kebutuhan program studi yang selaras dengan prioritas pembangunan SDM OAP. Diskusi juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat dan penyelarasan rencana pendirian PTN dengan arah kebijakan RIPPP dan Papua Cerdas.
- ❑ **Koordinasi Program Papua Cerdas dengan Dinas Pendidikan Sorong Selatan (11 November 2025):** Dalam pertemuan ini, Pokja Papua Cerdas menerima konsultasi mengenai Program SSH dan peluang integrasi Metode Gasing sebagai strategi peningkatan mutu pembelajaran di Kabupaten Sorong Selatan. Diskusi mempertegas bahwa integrasi kedua pendekatan dapat memperkuat intervensi peningkatan SPM Pendidikan, terutama melalui pembiasaan metode di satuan pendidikan lokus SSH. Pokja juga telah menyiapkan draf awal dokumen kolaborasi sebagai acuan teknis untuk ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah.
- ❑ **Koordinasi BPP PBD dengan Tim UNIPA (11 November 2025):** Pokja Papua Cerdas melaksanakan koordinasi dengan Tim UNIPA guna bertukar informasi terkait isu pendidikan tinggi, kebutuhan program akademik, dan potensi kolaborasi di wilayah Papua Barat Daya. Pertemuan berlangsung sebagai diskusi terbuka tanpa pengambilan keputusan formal, namun memberikan gambaran awal mengenai peluang sinergi yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan percepatan pembangunan pendidikan.
- ❑ **Pelatihan Matematika Metode Gasing (12 November 2025):** Pokja Papua Cerdas meninjau pelaksanaan pelatihan Metode Gasing sebagai bagian dari upaya peningkatan numerasi siswa. Kegiatan ini menghasilkan pemahaman bahwa Metode Gasing dapat diintegrasikan dengan Sistem Sekolah Harapan (SSH) secara komplementer untuk meningkatkan keterampilan numerasi serta pengembangan IQ, EQ, dan SQ peserta didik. Intervensi dianjurkan berbasis satuan pendidikan agar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan SPM Numerasi, dengan lokus yang ditetapkan berdasarkan analisis Rapor Pendidikan.

- ❑ **Monev Otsus Pendidikan di Kabupaten Sorong (14 November 2025):** Dalam monitoring dan evaluasi di Kabupaten Sorong, Pokja Papua Cerdas memperoleh informasi mengenai capaian serapan Dana Otsus sebesar 47% dan program prioritas yang dibiayai, meliputi Sekolah Gratis, Program Afirmasi, dan peningkatan kualitas guru. Diskusi juga membahas pentingnya pemerataan distribusi ASN/P3K Guru untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Dinas telah memulai penyusunan perencanaan tahun 2026 agar selaras dengan kebijakan provinsi dan kebutuhan daerah.
- ❑ **Monev Otsus Pendidikan di Kota Sorong (17 November 2025):** Monitoring di Kota Sorong menunjukkan serapan Dana Otsus berada pada kisaran 40–50% dengan fokus pada tiga program prioritas yang sama. Dinas Pendidikan telah melakukan harmonisasi awal perencanaan tahun 2026 dengan RPJMD Kota Sorong dan arah RIPP, meskipun sejumlah dokumen pendukung belum tersedia pada saat pertemuan. Kebutuhan pelengkapan dokumen ini menjadi dasar koordinasi lanjutan untuk sinkronisasi program tahun berikutnya.
- ❑ **Koordinasi Lanjutan dengan Dinas Pendidikan Sorong Selatan (19 November 2025):** Melalui koordinasi ini, Pokja Papua Cerdas dan Dinas Pendidikan Sorong Selatan memperbarui informasi terkait pelaksanaan program pendidikan di daerah. Pertemuan menghasilkan identifikasi awal mengenai capaian, hambatan, serta kebutuhan dukungan teknis yang memerlukan pembahasan lanjutan. Komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi rutin menjadi dasar penting penyelarasan perencanaan tahun 2026 dengan prioritas Papua Cerdas.
- ❑ **Pendampingan Revitalisasi Vokasi – Kemenko PMK (20 November 2025):** Pokja Papua Cerdas mendampingi Dinas Pendidikan PBD dalam koordinasi dengan Kemenko PMK terkait pelaksanaan kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi. Forum ini menegaskan pentingnya penyelarasan kebijakan lintas kementerian serta optimalisasi Tim Koordinasi Vokasi Daerah (TKVD) sebagai bagian dari pelaksanaan Permenko PMK. Dukungan pemerintah pusat membuka ruang koordinasi teknis lanjutan untuk memperkuat pelatihan vokasi yang terpadu di Papua Barat Daya.
- ❑ **Pendampingan Revitalisasi Vokasi – Kemendikti Saintek (21 November 2025):** Pada koordinasi lanjutan di Kemendikti Saintek, Pokja Papua Cerdas dan Dinas Pendidikan memperoleh arahan teknis terkait percepatan revitalisasi pendidikan vokasi, khususnya pembaruan data pada PDDikti untuk mendukung operasional program studi pada tahun akademik 2026. Forum ini membuka ruang sinergi dengan perguruan tinggi di Papua Barat Daya serta memperkuat kesiapan daerah menghadapi penerimaan mahasiswa baru di program vokasi yang direvitalisasi.

Kesimpulan:

Rangkaian kegiatan Pokja Papua Cerdas sepanjang November 2025 menunjukkan penguatan signifikan pada tata kelola pendidikan, pendidikan vokasi, dan perluasan akses pendidikan tinggi. Melalui koordinasi lintas-level, pendampingan teknis, dan evaluasi lapangan, BPP PBD mempertegas perannya sebagai simpul percepatan pembangunan pendidikan di Papua Barat Daya. Kegiatan selama bulan ini menjadi fondasi penting bagi pencapaian Misi Papua Cerdas yang lebih terarah, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan wilayah.



PAPUA PRODUKTIF (1)



Selama bulan November 2025, Pokja Papua Produktif BPP Papua Barat Daya melaksanakan rangkaian kegiatan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi Orang Asli Papua (OAP) sesuai arah kebijakan Misi Papua Produktif dalam RIPPP. Kegiatan dilakukan melalui pertemuan dengan asosiasi komunitas lokal, pendampingan teknis, forum literasi keuangan, serta kunjungan lapangan ke kabupaten/kota untuk meninjau pelaksanaan program strategis seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan pendataan OAP. Upaya-upaya ini mencerminkan penguatan kolaborasi multipihak serta penyelarasan program pusat–provinsi–kabupaten/kota untuk mendorong ekonomi rakyat berbasis potensi lokal.

- ❑ **Pertemuan dengan Asosiasi Mama-Mama Pedagang Papua Barat Daya (10 November 2025):** Pokja Papua Produktif melaksanakan pertemuan dengan Asosiasi Mama-Mama Pedagang seluruh Papua Barat Daya untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan ekonomi yang dihadapi mama-mama Papua di pasar-pasar lokal. Diskusi menyoroti kebutuhan modal, akses sarana prasarana yang memadai, serta penguatan kelembagaan asosiasi. Pertemuan ini menjadi ruang berbagi konsep pemberdayaan dan memperkuat koordinasi antara asosiasi, pemerintah daerah, dan BPP sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan OAP. Asosiasi menyampaikan komitmen memperbaiki organisasi internal, sementara pemerintah menyampaikan dukungan untuk menjajaki program sinergi melalui skema Otsus, pelatihan, dan penguatan koperasi.
- ❑ **Sinkronisasi–Koordinasi–Evaluasi Papua Produktif di Kabupaten Tambrau (17–18 November 2025):** Pokja Papua Produktif melakukan kunjungan koordinasi ke Kabupaten Tambrau untuk meninjau progres penyusunan Masterplan Jalan pada lima distrik kawasan konservasi serta perkembangan berbagai program strategis daerah. Pertemuan menghasilkan pemahaman bersama pentingnya percepatan penyusunan dokumen masterplan sebagai dasar proses IPPKH di tingkat kementerian. Pemerintah kabupaten juga menegaskan urgensi penerbitan SK Tim/Forum Teknis sebagai dasar legalitas kerja lintas sektor. Selain itu, diperoleh update terkait progres program seperti MBG, Operasi Merah Putih, SPPG (dapur sehat 3T), dan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari konsolidasi data untuk pelaporan BP3OKP. Forum ini memperkuat koordinasi lintas OPD dan membuka ruang pembaruan data secara berkala.
- ❑ **Forum SHEK BPP–BRI: Sosialisasi KUR untuk Pelaku Usaha OAP (24 November 2025):** Pokja Papua Produktif bersama BRI menyelenggarakan Forum SHEK yang bertujuan memperluas pemahaman pelaku usaha OAP terhadap mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR). Forum ini menjadi ruang dialog langsung antara pelaku usaha dan BRI untuk membahas tantangan terkait legalitas usaha, administrasi, dan hambatan SLIK merah. Diskusi menekankan pentingnya penguatan koperasi, literasi keuangan, dan sinergi dengan program seperti MBG, SSH, dan Otsus untuk memperluas pasar komoditas lokal. Peserta juga mengidentifikasi kebutuhan layanan perbankan yang lebih dekat, terutama bagi wilayah seperti Maybrat. Kegiatan ini mendorong percepatan akses pembiayaan produktif sebagai bagian dari pengembangan ekonomi rakyat.
- ❑ **Sinkronisasi–Koordinasi–Evaluasi Papua Produktif di Kabupaten Sorong (25 November 2025):** Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sorong, Pokja Papua Produktif melaksanakan sinkronisasi data terpilah OAP dan menyelaraskan definisi, metodologi, serta mekanisme pembaruan data lintas OPD. Forum ini juga meninjau pelaksanaan Program MBG, termasuk kebutuhan perbaikan SOP, distribusi pangan lokal, dan penguatan koordinasi Satgas. Selain itu, dibahas perkembangan Koperasi Merah Putih yang dinilai strategis untuk pemberdayaan ekonomi OAP, namun masih memerlukan penguatan kelembagaan, data komoditas, dan dukungan pembiayaan. Pertemuan ini memberi gambaran kesiapan Kabupaten Sorong dalam mengakselerasi Misi Papua Produktif secara lebih terukur melalui kolaborasi multipihak.
- ❑ **Sinkronisasi–Koordinasi–Evaluasi Papua Produktif di Kabupaten Raja Ampat (27–28 November 2025):** Kunjungan kerja ke Kabupaten Raja Ampat berfokus pada pendataan OAP, penyerapan dana Otsus, serta pemantauan pelaksanaan program strategis seperti MBG dan Koperasi Merah Putih. Pendataan OAP masih berlangsung dan terkendala kondisi geografis serta keterbatasan tenaga pendata, namun ditargetkan selesai sebelum 16 Desember 2025. Program MBG dinilai belum optimal dalam memanfaatkan pangan lokal, sementara ketersediaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) masih sangat terbatas. Diskusi juga mengangkat perlunya koordinasi antar-OPD untuk mempercepat pelaksanaan program ekonomi OAP dan menindaklanjuti kebutuhan terkait investor dapur 3T. Kegiatan ini memberikan gambaran tantangan dan peluang penguatan Papua Produktif di wilayah kepulauan.

Kesimpulan: Seluruh rangkaian kegiatan Pokja Papua Produktif selama November 2025 menunjukkan penguatan koordinasi lintas pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas ekonomi OAP dalam rangka mempercepat pelaksanaan program ekonomi berbasis potensi lokal. Melalui pendampingan teknis, sinkronisasi data, dan dialog multipihak, BPP PBD mempertegas perannya sebagai simpul koordinasi untuk memastikan program strategis seperti MBG, Koperasi Merah Putih, pendataan OAP, serta pemberdayaan ekonomi perempuan Papua dapat berjalan lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Upaya-upaya ini menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi Papua Barat Daya yang produktif, inklusif, dan berbasis kekuatan masyarakat OAP.



KEGIATAN STRATEGIS BERSAMA



Selama bulan November 2025, BPP Provinsi Papua Barat Daya menjalankan serangkaian kegiatan strategis lintas pokja sebagai bagian dari penguatan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. Kegiatan-kegiatan ini mencerminkan kolaborasi intensif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, lembaga vertikal, DPRPBD, institusi keagamaan, serta masyarakat, guna memastikan empat misi utama—Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Damai—terimplementasi secara terpadu dan responsif terhadap dinamika pembangunan di Papua Barat Daya. Beragam agenda strategis bulan November menunjukkan peran BPP sebagai simpul koordinasi yang memperkuat stabilitas, meningkatkan tata kelola pemerintahan, memperkuat basis data OAP, mempercepat program layanan dasar, serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat Papua. Kegiatan-kegiatan ini juga menjadi media penyampaian perkembangan, identifikasi isu strategis, penyelarasan kebijakan, serta percepatan integrasi program lintas sektor. Highlight Kegiatan Strategis Bersama November 2025:

- ❑ **Penguatan Tata Kelola Otonomi Khusus dan Penyelarasan Arah Kebijakan Nasional:** Partisipasi dalam Rapat Pleno BPP/BP3OKP bersama Ketua BPP (Wakil Presiden RI) untuk memutakhirkan data lintas sektor enam provinsi dan menyiapkan arah kebijakan percepatan pembangunan Papua tahun 2026; Penegasan pentingnya tata kelola data yang terintegrasi, penguatan layanan dasar, dan harmonisasi program empat misi.
- ❑ **Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dan Penyerapan Anggaran:** Kehadiran dalam Rakor Kepala Daerah bersama Wamendagri yang menyoroti rendahnya serapan anggaran Pemda PBD serta implikasinya terhadap percepatan pembangunan daerah; BPP melakukan monitoring lanjutan dan koordinasi terkait perbaikan tata kelola fiskal.
- ❑ **Penguatan Harmoni Sosial dan Ketahanan Masyarakat:** Partisipasi dalam Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah I, memperkuat komunikasi lintas keagamaan dan mendorong harmoni sosial sesuai amanat RIPPP.
- ❑ **Kolaborasi Pusat–Daerah untuk Infrastruktur Pemerintahan:** Pendampingan Kunjungan Kerja Ibu Wamendagri dan Ibu Wamen PUPR RI ke lokasi pembangunan Kantor Gubernur PBD, memperkuat koordinasi pembangunan infrastruktur strategis pemerintah provinsi.
- ❑ **Sinkronisasi Kebijakan Fiskal, Perencanaan, dan Penganggaran Daerah:** Kehadiran pada Sosialisasi Permendagri 14/2025 tentang APBD 2026, memastikan kebijakan fiskal selaras dengan prioritas RIPPP; Partisipasi pada Rapat Paripurna DPRPBD tentang Rancangan Perda APBD 2026, mencermati keselarasan alokasi anggaran dengan program prioritas Otsus dan pembangunan sektor-sektor layanan dasar.

- ❑ **Penguatan Keamanan Wilayah dan Percepatan Layanan Dasar Kabupaten Maybrat:** Koordinasi strategis bersama Bupati Maybrat, membahas stabilitas keamanan, layanan dasar, pembangunan infrastruktur, MBG, Koperasi Merah Putih, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan pemulihan pascakonflik; Forum menyepakati langkah tindak lanjut untuk mendukung pemekaran distrik, perbaikan layanan, dan penguatan program afirmasi.
- ❑ **Penyelarasan Sistem Keuangan dan Pertukaran Data Fiskal:** Fasilitas pertemuan BPKAD – DJPb – KPPN Sorong untuk meningkatkan efektivitas mekanisme pengelolaan anggaran daerah. Koordinasi khusus dengan DJPb Papua Barat terkait penyediaan data LKPD untuk mendukung analisis kebijakan BPP.
- ❑ **Penguatan Pemahaman Publik terhadap Otonomi Khusus:** Keterlibatan BPP sebagai narasumber dalam Dialog RRI “24 Tahun Otsus: Papua Cerdas, Sehat, Produktif”, guna menyampaikan perkembangan Otsus, capaian layanan publik, serta tantangan tata kelola anggaran; Forum menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi multipihak.
- ❑ **Percepatan Implementasi Program Strategis Nasional MBG:** Partisipasi dalam Rapat Satgas MBG Provinsi, membahas strategi percepatan, integrasi pangan lokal, penyiapan Rakerda MBG, serta penguatan koordinasi kabupaten/kota.
- ❑ **Penguatan Satu Data OAP dan Pemanfaatan Data Afirmasi:** Kehadiran pada Launching Data Induk OAP Kabupaten Sorong sebagai bagian dari penguatan tata kelola data terstandar dan terverifikasi; Data OAP menjadi basis integrasi untuk Papua Sehat, Cerdas, Produktif, MBG, beasiswa afirmasi, kewirausahaan OAP, dan perencanaan pembangunan sosial.
- ❑ **Penguatan Identitas Kultural dan Komitmen Otonomi Khusus:** Partisipasi pada Upacara Peringatan Hari Otonomi Khusus ke-24, memperteguh komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan Otsus, stabilitas daerah, serta layanan dasar berbasis hak-hak masyarakat Papua.

Kesimpulan: Pelaksanaan kegiatan strategis bersama BPP Papua Barat Daya pada bulan November 2025 menunjukkan peran BPP sebagai pengarah, penghubung, dan katalisator dalam penguatan tata kelola pemerintahan, stabilitas wilayah, layanan dasar, pendataan OAP, percepatan program strategis, dan pembangunan masyarakat Papua. Melalui koordinasi simultan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga vertikal, DPRPBD, komunitas keagamaan, dan kelompok masyarakat, empat misi utama—Papua Sehat, Cerdas, Produktif, dan Damai—diimplementasikan secara terpadu untuk mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus yang lebih akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan. Kegiatan strategis bersama pada bulan ini menjadi fondasi penting bagi penyusunan perencanaan tahun 2026, memperkuat tata kelola data dan anggaran, serta memastikan percepatan pembangunan di Papua Barat Daya berjalan terukur dan selaras dengan RIPPP.

Capaian & Rekomendasi





CAPAIAN

Selama bulan November 2025, BPP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan berbagai kegiatan koordinatif, sinkronisasi, harmonisasi, dan evaluasi (SHEK) di berbagai bidang yang berlandaskan tiga misi utama Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, serta didukung oleh aspek kondisi perlu dan pengarusutamaan. Secara umum, capaian pelaksanaan tugas dan fungsi pada bulan ini menunjukkan capaian sebagai berikut:

1. **Penguatan tata kelola Otsus dan penyelarasan perencanaan daerah** terlihat dari intensitas koordinasi dengan BPKAD, DJPb, DPRD, dan OPD dalam forum APBD, monitoring serapan, serta harmonisasi perencanaan 2026 dengan RIPPP. Upaya ini memperbaiki akuntabilitas belanja dan memastikan kebijakan Otsus berjalan adaptif sesuai kebutuhan daerah.
2. **Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan** diperkuat melalui integrasi SSH–Gasing, evaluasi pelaksanaan Otsus pendidikan di kabupaten/kota, pendampingan revitalisasi pendidikan vokasi, serta sinkronisasi kebijakan kesehatan. Koordinasi PSC 119 dengan Kemenkes dan pendampingan Renstra RSUD menunjukkan komitmen BP3OKP untuk membangun layanan dasar yang merata dan terstandar.
3. **Penguatan ekosistem ekonomi rakyat** tampak melalui fasilitasi KUR untuk OAP, penguatan pangan lokal dalam MBG, serta konsolidasi Koperasi Merah Putih sebagai instrumen ekonomi komunitas. Kegiatan ini memperkuat fondasi Papua Produktif yang berbasis pada kapasitas lokal dan keberlanjutan ekonomi OAP.
4. **Peningkatan kualitas data OAP dan penataan ruang** menjadi capaian penting melalui launching Database OAP Kabupaten Sorong dan percepatan penyusunan masterplan lima distrik Tambrau, yang memperkuat sistem pendataan dan dasar spasial pembangunan daerah.



REKOMENDASI UMUM

Rekomendasi umum berdasarkan rekapitulasi kegiatan dan capaian antara lain :

1. **Memperkuat konsistensi tata kelola Otsus dan integrasi perencanaan daerah:** Diperlukan peningkatan pendampingan terhadap kabupaten/kota dalam penyelarasan perencanaan 2026, peningkatan kualitas dokumen perencanaan–penganggaran, serta konsistensi pelaporan Dana Otsus agar pemanfaatannya semakin tepat sasaran dan mendukung prioritas RIPPP.
2. **Mempercepat integrasi kebijakan dan layanan dasar pendidikan–kesehatan:** Integrasi SSH–Gasing perlu diperluas pada sekolah lokus OAP dengan dukungan pelatihan guru, sementara sinkronisasi kesehatan—termasuk penguatan PSC 119 dan penyusunan Renstra RSUD—perlu dilanjutkan melalui koordinasi teknis rutin dengan Kemenkes dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
3. **Memperkuat ekosistem Papua Produktif berbasis kapasitas lokal:** Perlu mendorong penguatan kelembagaan ekonomi OAP melalui Koperasi Merah Putih, peningkatan literasi keuangan untuk akses KUR, serta sinergi pangan lokal dengan MBG untuk menciptakan rantai nilai yang lebih stabil dan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.
4. **Mengakselerasi pemutakhiran data OAP dan penyempurnaan tata ruang:** Pemutakhiran data OAP harus dilanjutkan secara terstandar untuk mendukung afirmasi lintas sektor, sementara penyusunan masterplan dan sinkronisasi RTRW perlu dipercepat agar menjadi dasar teknis pembangunan yang presisi dan responsif terhadap kebutuhan kawasan konservasi maupun wilayah sulit akses.

Penutup

Demikian penyampaian **Laporan Percepatan Pembangunan Papua** Periode Bulan **November 2025** **Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya.**



Laporan Bulanan

Badan Pengarah Papua

NOVEMBER 2025

Laporan Operasional & Kegiatan

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

Provinsi Papua Barat Daya



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga, penyusunan Laporan Bulanan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan laporan operasional dan kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya periode bulan November 2025. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan, realisasi dan kinerja BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Sorong, 10 Desember 2025

Anggota BP3OKP

Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya,



Drs. Otto Ihatau, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Maksud & Tujuan	4
1.2 Ringkasan Kelembagaan	4
1.2.1 Landasan/Dasar Aturan.....	4
1.2.2 Definisi	5
1.2.3 Struktur Kelembagaan.....	5
1.2.4 Tugas dan Fungsi.....	5
1.2.5 Sumber Daya Manusia Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya	6
1.2.6 Sarana & Prasarana Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya	7
BAB II KEGIATAN DAN CAPAIAN	8
2.1 Rekapitulasi Kegiatan	8
2.2 Capaian	69
BAB III PENUTUP	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud & Tujuan

Laporan ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai laporan rutin yang dilaporkan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Badan Pengarah Papua (BPP), Sekretaris Eksekutif Badan Pengarah Papua (BPP), Kepala Sekretariat BPP Provinsi Jayapura (selaku koordinator Sekretariat BPP), serta Kepala Sekretariat BPP Sorong (KPPN Sorong selaku Tim Dukungan Administratif Sekretariat BPP/BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya).

Tujuan dari disusunnya laporan ini antara lain :

- 1) Sebagai sarana pemantauan pelaksanaan kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya periode bulan November 2025.
- 2) Sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya pada bulan November 2025.
- 3) Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan/ atau program kerja, penyelenggaraan dan evaluasi kerja BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya untuk bulan yang akan datang.
- 4) Sebagai laporan operasional Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya.

1.2 Ringkasan Kelembagaan

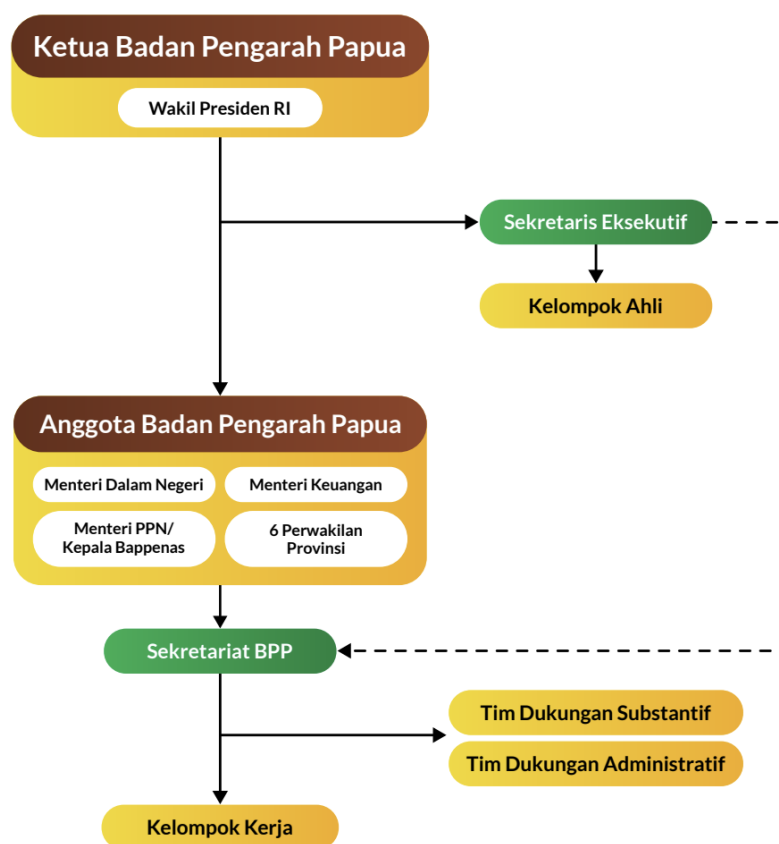
1.2.1 Landasan/Dasar Aturan

- 1) Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- 2) Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- 3) Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua.
- 4) Keputusan Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

1.2.2 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.2.3 Struktur Kelembagaan



1.2.4 Tugas dan Fungsi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi :
- Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
 - Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
 - Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

1.2.5 Sumber Daya Manusia Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya

Ringkasan jumlah sumber daya manusia yang ada di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya antara lain :

No	Unit Kerja	Jumlah (Orang)
1	Pimpinan (Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya)	1
2	Kelompok Kerja	
	Papua Sehat	1
	Papua Cerdas	1
	Papua Produktif	1
	Papua Polhukam/Damai	1 (Nonaktif)
	Usulan Pokja yang Aktif Terlibat	4
3	KPPN Sorong sebagai Tim Dukungan Administratif	5
4	Staf PPNPN	3
Jumlah		13

1.2.6 Sarana & Prasarana Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya

No	Uraian	Jumlah (Unit/Set) / Keterangan
A	Bangunan	1 Unit (Milik GKN Sorong)
B	Ruangan	
	Front Office	1 Unit
	Ruang Rapat	1 Unit
	Ruang Kerja Pimpinan/Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya	1 Unit
	Ruang Istirahat Pimpinan/ Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya	1 Unit
	Ruang Dapur	1 Unit
	Ruang Kamar Mandi/Toilet	2 Unit
C	Peralatan dan Perlengkapan	
	Meja Kerja	10 Unit
	Kursi Kerja	10 Unit
	Meja Rapat	1 Unit
	Kursi Rapat	9 Unit
	Meja Tamu	1 Unit
	Kursi Tamu	3 Unit
	AC	5 Unit
	Printer	2 Unit
	Laptop	7 Unit
	Sofa Tamu	1 Set
	Smart TV	3 Unit
	Meja dan Kursi Makan	1 Set
	Kulkas	1 Unit
	Kompor Listrik	1 Unit
	Dispenser	2 Unit
	Mesin Kopi	1 Unit
	Jam Dinding	3 Unit
	Kitchen Set	1 Set
	CCTV	4 Unit
	Lemari Arsip	1 Unit
	Lemari Kamar	1 Unit
	Tempat Tidur	1 Unit
	Rak Piring Kecil	2 Unit
	Starlink	1 Unit
	Hardisk	2 Unit
	ATK (Stapler, Gunting, Penggaris, dll)	Tersedia
	Peralatan Makan (Piring, Sendok, dll)	Tersedia

BAB II

KEGIATAN DAN CAPAIAN

2.1 Rekapitulasi Kegiatan

Rekapitulasi kegiatan BPP Provinsi Papua Barat Daya pada bulan November tahun 2025, antara lain :

1) Kegiatan 1

Nama Kegiatan	Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP/BPP)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin-Rabu, 3-5 November 2025 di Gedung Keuangan Negara Manokwari
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Mengikuti rapat internal BPP yang dipimpin langsung oleh Ketua BPP (Wakil Presiden Republik Indonesia) dalam rangka membahas perkembangan pelaksanaan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. 2. Menyampaikan dan memperoleh pemutakhiran data lintas sektor dari enam provinsi di Tanah Papua sebagai bahan penyusunan arah kebijakan dan prioritas percepatan pembangunan. 3. Melaksanakan fungsi koordinasi internal untuk harmonisasi program Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif dengan arah kebijakan nasional sesuai amanat RIPPP dan Rencana Aksi percepatan pembangunan. 4. Mengidentifikasi isu-isu strategis lintas sektor yang memerlukan perhatian dan arahan langsung dari Ketua BPP.
Peserta Kegiatan	Wakil Presiden RI (Ketua BPP); Staf Khusus Wakil Presiden; Wamendagri; Sekretariat BPP Jayapura dan Manokwari; Anggota BPP (6 Provinsi);
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	SHEK
Misi/Keterangan	BPP dan RIPPP
Hasil Kegiatan	1. Ketua BPP (Wapres RI) menerima paparan komprehensif mengenai kondisi kesehatan, pendidikan,

	perekonomian, ketenagakerjaan, dan layanan dasar dari enam provinsi di Tanah Papua sebagai gambaran nyata pelaksanaan Otsus di lapangan. 2. Forum mencatat perlunya penguatan tata kelola data terintegrasi untuk mendukung perencanaan afirmatif yang lebih tepat sasaran di seluruh provinsi. 3. Pemaparan menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan layanan dasar, pemerataan SDM, pemanfaatan dana Otsus yang lebih optimal, serta dukungan infrastruktur untuk menunjang pelaksanaan program strategis. 4. Ketua BPP memberikan arahan agar sinergi antarsektor dan antarprovinsi diperkuat melalui mekanisme SHEK serta memastikan setiap intervensi memiliki landasan data yang kuat dan terverifikasi. 5. Forum internal menghasilkan masukan awal untuk penyusunan prioritas program kerja BPP Tahun 2026 berdasarkan isu-isu strategis yang muncul dari pemutakhiran data lintas provinsi.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Sebagai tindak lanjut, BPP akan melakukan pendalaman analisis data dan menyelaraskan seluruh informasi sektoral dari enam provinsi sebagai dasar penyusunan arah kebijakan percepatan pembangunan tahun 2026. BPP juga akan mengoordinasikan forum teknis lanjutan guna memperkuat penyelarasan antara program Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif dengan kebutuhan dan kondisi spesifik setiap provinsi. Selain itu, diperlukan peningkatan integrasi sistem data dan mekanisme pelaporan untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti, serta harmonisasi program lintas kementerian/lembaga sesuai arahan Ketua BPP. Seluruh perangkat internal BPP akan memastikan proses perencanaan tahun 2026 berjalan terukur, akuntabel, dan konsisten dengan prinsip sinkronisasi–harmonisasi–evaluasi–koordinasi.



Dokumentasi

2) Kegiatan 2

Nama Kegiatan	Rapat Kerja Bulanan BPP Papua Barat dan BPP Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 3-5 November 2025 di Aula Kasuari Lantai III GKN Manokwari
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Memperkuat koordinasi kelembagaan BPP dan Komite Percepatan dalam mendukung implementasi RIPP 2. Melaksanakan evaluasi program dan capaian BPP. 3. Melaksanakan evaluasi dan perkembangan PSN di Tanah Papua. 4. Mengonsolidasikan informasi, data, dan laporan capaian program OTSUS dari masing-masing BPP.
Peserta Kegiatan	Sekretariat BPP Manokwari; Anggota BPP Papua Barat dan Papua Barat Daya; Anggota Pokja BPP Papua Barat dan Papua Barat Daya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	SHEK
Misi/Keterangan	BPP dan RIPP
Hasil Kegiatan	1. Terhimpunnya informasi dan data terbaru mengenai capaian program OTSUS serta agenda percepatan pembangunan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.

	2. Teridentifikasinya isu strategis yang perlu menjadi perhatian Wapres, antara lain pendanaan OTSUS, pemenuhan SPM, penguatan lembaga adat, ketahanan pangan, percepatan sektor pendidikan, serta pengembangan ekonomi lokal. 3. Terdeskripsikannya kebutuhan penguatan koordinasi lintas lembaga untuk mendorong sinkronisasi program, termasuk terkait PSN.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Melaksanakan rapat koordinasi teknis tambahan dengan OPD terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat sinkronisasi substansi. 2. Mengembangkan dashboard data bersama guna memastikan konsistensi data terkait OAP, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur di dua provinsi. 3. Mempersiapkan usulan kebijakan strategis yang akan disampaikan kepada Wapres, terutama berkaitan dengan percepatan implementasi RIPPP. 4. Mendorong ruang diskusi khusus mengenai sistem sinergitas kerja BPP dan KEPPP, melalui kolaborasi antara BPP dan KEPPP.
Dokumentasi	



3) Kegiatan 3

Nama Kegiatan	Kunjungan Kerja Wakil Menteri Dalam Negeri di Provinsi Papua Barat Daya: Rakor Kepala Daerah
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 6 November 2025 di Rylich Panorama Hotel Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Menghadiri undangan Rakor Kepala Daerah bersama Wakil Menteri Dalam Negeri sebagai perwakilan BPP Provinsi Papua Barat Daya. 2. Mengikuti proses evaluasi penyerapan anggaran oleh Wamendagri di Provinsi Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	Wamendagri; BPP PBD (Anggota BPP PBD, Pokja Sehat dan Pokja Cerdas); Forkopimda PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi dan Evaluasi
Misi/Keterangan	RIPPP
Hasil Kegiatan	Penyerapan anggaran di Papua Barat Daya rendah, yang dapat berdampak pada terhambatnya pembangunan dan pelaksanaan program yang seharusnya telah berjalan sejak awal.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Melaksanakan evaluasi lanjutan terhadap serapan anggaran.

Dokumentasi



4) Kegiatan 4

Nama Kegiatan	FGD Pendirian Akademi Komunitas di Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis-Sabtu, 6-8 November 2025 di Rylich Panorama Hotel Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Menghadiri undangan FGD sebagai narasumber dari perwakilan BPP Provinsi Papua Barat Daya. 2. Mendapatkan penjelasan teknis mengenai status izin operasional PDD-AKNESS dan rencana operasional tahun 2026.

	3. Melakukan diskusi bersama pemangku kepentingan terkait pendirian dan revitalisasi Akademi Komunitas di Provinsi Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota BPP PBD dan seluruh Pokja); Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota se-PBD; UNIPA; Akademisi; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Hasil Kegiatan	1. Revitalisasi pendidikan vokasi dilaksanakan sesuai amanat Perpres Nomor 68 Tahun 2023 dan Permenko PMK Nomor 05 Tahun 2023 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Indonesia. 2. PDD-AKNESS Kabupaten Sorong Selatan telah ditetapkan sebagai lembaga pendidikan vokasi yang direvitalisasi oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. 3. Izin program studi masih aktif. Operasional tahun 2026 dapat dilaksanakan melalui validasi data dosen dan lulusan AKNESS sebagai upaya pengaktifan operasional sehingga dapat menerima mahasiswa baru. 4. Revitalisasi dan pengembangan pendidikan vokasi, termasuk pendirian Akademi Komunitas (AK), merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan sesuai amanat PP Nomor 106 Tahun 2022. 5. Pemerintah Provinsi menargetkan AKNESS mulai menerima mahasiswa baru pada tahun 2026.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat. 2. Melakukan pembaruan data PDD-AKNESS pada Sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek RI. 3. Menyiapkan pendanaan serta membentuk Tim Revitalisasi untuk penyusunan Grand Desain PDD-

	AKNESS dan pengembangan Akademi Komunitas di Provinsi Papua Barat Daya.
Dokumentasi	 

5) Kegiatan 5

Nama Kegiatan	FGD Pendirian Perguruan Tinggi Negeri Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 7 November 2025 di Vega Hotel Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Menghadiri undangan FGD yang membahas rencana pendirian Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Provinsi Papua Barat Daya sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan tinggi. 2. Melaksanakan fungsi koordinasi dan harmonisasi kebijakan pendidikan tinggi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan di wilayah Papua Barat Daya.

	3. Mengidentifikasi kebutuhan kelembagaan, sumber daya, dan dukungan regulasi dalam proses pendirian PTN baru. 4. Mengumpulkan masukan serta menyelaraskan rencana pendirian PTN dengan arah pembangunan pendidikan dalam RIPPP dan kebijakan Papua Cerdas.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Produktif); Pemda PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Hasil Kegiatan	1. Forum menyampaikan urgensi pendirian PTN baru di Papua Barat Daya untuk memperluas akses pendidikan tinggi, mengurangi disparitas wilayah, dan memperkuat kapasitas SDM OAP. 2. Perwakilan pemerintah daerah menekankan perlunya dukungan pusat dalam pembentukan kelembagaan, pemenuhan standar akademik, dan penyediaan tenaga dosen.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Diperlukan pemetaan awal terkait kesiapan daerah, termasuk ketersediaan lahan, struktur organisasi, kebutuhan program studi, dan potensi kolaborasi dengan perguruan tinggi yang sudah ada di wilayah Sorong Raya. 2. BPP Papua Barat Daya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan OPD terkait untuk menyiapkan data awal dan dokumen teknis yang dibutuhkan dalam proses pengusulan pendirian PTN. Selanjutnya, diperlukan pertemuan lanjutan dengan Kemendikbudristek untuk memperoleh arahan teknis, termasuk mekanisme pembentukan kelembagaan PTN dan sinkronisasi dengan kebijakan nasional pendidikan tinggi.
Dokumentasi	-

6) Kegiatan 6

Nama Kegiatan	Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah I
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 7 November 2025 di Aula Lux Oriente Kristus Raja Kota Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Menghadiri undangan kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah I sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. 2. Menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan para pemangku kepentingan serta peserta kegiatan. 3. Mengamati pelaksanaan acara sebagai bagian dari kegiatan representasi kehadiran pemerintah pusat dan/atau daerah.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota BPP PBD); Pemda PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Harmonisasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Harmoni Sosial)
Hasil Kegiatan	1. Kegiatan berlangsung dengan lancar dan dihadiri oleh perwakilan berbagai unsur gereja serta peserta dari beberapa wilayah. 2. Terjalin komunikasi dan interaksi positif antara peserta, panitia, dan pihak undangan. 3. Kehadiran BPP PBD memberikan dukungan moral terhadap penyelenggaraan kegiatan keagamaan di masyarakat.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Menjaga komunikasi dengan panitia dan pihak terkait untuk pemutakhiran informasi mengenai kegiatan serupa di masa mendatang. 2. Mendokumentasikan kehadiran dan partisipasi dalam kegiatan sebagai bagian dari laporan tugas kedinasan. 3. Mengikuti perkembangan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di bidang keagamaan sesuai amanat RIPPP (Harmoni Sosial).

Dokumentasi



7) Kegiatan 7

Nama Kegiatan	Pendampingan Kunjungan Kerja Ibu Wamendagri dan Ibu Wamen PUPR RI di Lokus Pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 7 November 2025 di Lokus Kantor Gubernur PBD
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Mendampingi kunjungan kerja Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri dan Ibu Wakil Menteri PUPR RI pada peninjauan lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya. Mendukung kelancaran koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pemerintahan.
Peserta Kegiatan	Wamendagri; Wamen PUPR RI; BPP PBD (Anggota BPP PBD); Gubernur PBD; Pemda PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi dan Harmonisasi
Misi/Keterangan	BPP
Hasil Kegiatan	1. Kunjungan kerja berlangsung dengan baik dan diikuti oleh perangkat daerah serta pihak terkait. 2. Disampaikan penjelasan umum mengenai progres pembangunan dan kondisi lokasi yang menjadi bagian dari agenda peninjauan. 3. Terjalin komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana.

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	1. Mendokumentasikan hasil pendampingan dan menyampaikan laporan kepada pimpinan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas kedinasan. 2. Mengikuti perkembangan lanjutan yang disampaikan oleh instansi teknis terkait pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya. 3. Menjaga koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait untuk mendukung kelancaran proses pembangunan sesuai kewenangan masing-masing.
Dokumentasi	 

8) Kegiatan 8

Nama Kegiatan	Sosialisasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at-Sabtu, 7-8 November 2025 di Hotel Mambramo Royal Kampung Baru Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Menghadiri undangan sosialisasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2025. 2. Melakukan sinkronisasi perencanaan program agar selaras dengan regulasi yang berlaku di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya terkait pelaksanaan Otonomi Khusus.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Sehat); Pemda PBD; BPKAD se-PBD; Kemendagri; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi dan Sinkronisasi
Misi/Keterangan	RIPPP – Tata Kelola
Hasil Kegiatan	1. Dijelaskan bahwa dalam kondisi efisiensi anggaran, terutama pada dana transfer ke daerah, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan anggaran. 2. Prioritas utama dalam penyusunan APBD meliputi: • Belanja gaji dan tunjangan pegawai, • Belanja operasional perkantoran, • Belanja untuk pelayanan publik.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	BPP akan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
Dokumentasi	

9) Kegiatan 9

Nama Kegiatan	Pertemuan dengan Asosiasi Mama-Mama Pedagang Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 10 November 2025 di Sekretariat BPP PBD
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi mama-mama pedagang di berbagai pasar di Provinsi Papua Barat Daya. 2. Membangun koordinasi antara asosiasi dan pemerintah (Pemprov/BPP/OPD terkait) untuk memperkuat program pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua (OAP). 3. Menginventarisasi peluang sinergi, baik melalui pelatihan, permodalan, fasilitasi sarana prasarana, maupun integrasi dengan program nasional dan Otsus. 4. Melakukan sharing konsep serta program kerja yang diperlukan untuk memperkuat keberlanjutan asosiasi mama-mama Papua.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Produktif); Tim Asosiasi Mama-Mama Pedagang OAP se-PBD
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	1. Asosiasi mama Papua mengidentifikasi persoalan utama yang dihadapi mama-mama pedagang, yaitu kebutuhan modal, keterbatasan fasilitas pasar, persaingan usaha, dan penguatan kelembagaan. 2. Asosiasi perlu merumuskan usulan program prioritas sebagai dasar perencanaan intervensi pemerintah di sektor pemberdayaan ekonomi. 3. Pemerintah dan BPP menyampaikan komitmen untuk mengakomodasi sebagian usulan melalui kolaborasi lintas OPD serta pemanfaatan skema Otsus. 4. Asosiasi mama-mama menyatakan komitmen untuk memperkuat struktur organisasi, legalitas, dan

	koordinasi internal sebagai langkah awal penguatan kelembagaan.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Melaksanakan penguatan kelembagaan asosiasi melalui pendampingan legalitas, peningkatan kapasitas kepemimpinan, serta penyusunan SOP organisasi. 2. Mendorong pembentukan Koperasi Mama-Mama Papua yang bersinergi dengan Koperasi Merah Putih, dengan dukungan OPD terkait dan BPP sebagai model pemberdayaan ekonomi perempuan OAP. 3. Menyelenggarakan pelatihan manajemen usaha, literasi keuangan, dan pemasaran digital secara bertahap di masing-masing kabupaten/kota. 4. Mengintegrasikan program asosiasi dalam perencanaan Papua Produktif dan kebijakan ekonomi inklusif untuk tahun berjalan dan tahun berikutnya.
Dokumentasi	

10) Kegiatan 10

Nama Kegiatan	Koordinasi Pokja Cerdas dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 11 November 2025 di Sekretariat BPP PBD
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menerima kunjungan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan, Bapak Hengky Gogoba, SE, M.Tr.Ap, dalam rangka konsultasi terkait

	Program SSH dan Metode Gasing sebagai langkah percepatan Papua Cerdas serta sebagai bagian dari intervensi peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di Kabupaten Sorong Selatan.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota BPP PBD dan Pokja Cerdas); Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Hasil Kegiatan	1. Disampaikan bahwa inisiasi kolaborasi Metode Gasing dalam Program SSH berpotensi meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran di Kabupaten Sorong Selatan. 2. Inisiasi ini menjadi bentuk sinkronisasi program pusat dan daerah, terutama dalam situasi efisiensi anggaran. 3. Pembiasaan Metode Gasing perlu dimulai dengan menyiapkan guru atau tutor dari sekolah-sekolah lokus SSH sebagai pelaksana utama. 4. Pokja Cerdas BP3OKP PBD telah menyusun draf dokumen kolaborasi sebagai acuan awal pelaksanaan program di tingkat kabupaten.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Program Gasing akan diarahkan untuk berbasis pada satuan pendidikan, bukan melalui pengumpulan siswa atau guru lintas sekolah, sehingga intervensi dapat berdampak langsung pada peningkatan SPM Pendidikan. Untuk memastikan kesiapan perencanaan tahun 2026, perlu dilaksanakan forum SHEK khusus bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan. Selain itu, diperlukan koordinasi teknis antara Tim SSH dan Tim Gasing guna menyelaraskan metodologi, tahapan persiapan, serta kebutuhan implementasi di sekolah lokus.



11) Kegiatan 11

Nama Kegiatan	Pertemuan/Koordinasi antara BPP PBD dengan Tim UNIPA
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 11 November 2025 di Sekretariat BPP PBD
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Menerima kunjungan Tim Universitas Papua (UNIPA) ke Sekretariat BPP Papua Barat Daya. 2. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi terkait isu-isu pendidikan tinggi yang memerlukan dukungan sinergi antara perguruan tinggi dan BPP PBD. 3. Menjadi wadah pertukaran informasi mengenai program, kebutuhan, dan potensi kolaborasi akademik di wilayah Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota BPP PBD dan Pokja Produktif); Tim UNIPA
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas dan Papua Produktif
Hasil Kegiatan	1. Tim UNIPA menyampaikan informasi umum mengenai kegiatan dan program akademik yang sedang berjalan serta potensi kerja sama yang dapat dikembangkan di wilayah Papua Barat Daya. 2. BPP PBD memberikan gambaran mengenai peran, tugas, dan fokus kerja terkait percepatan pembangunan, khususnya pada bidang pendidikan dan peningkatan SDM OAP.

	3. Pertemuan berlangsung sebagai sesi diskusi terbuka, tanpa pengambilan keputusan formal, namun memberikan pemahaman awal mengenai kemungkinan sinergi ke depan. 4. Kedua pihak sepakat untuk menjaga komunikasi dan membuka ruang koordinasi lanjutan apabila diperlukan dalam mendukung pembangunan pendidikan di Papua Barat Daya.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Sebagai tindak lanjut, BPP PBD akan mempertahankan komunikasi dengan Tim UNIPA untuk mengidentifikasi peluang kolaborasi yang relevan dengan tugas dan fungsi BPP, khususnya dalam sektor pendidikan dan pengembangan SDM. Koordinasi lanjutan dapat dijadwalkan apabila terdapat kebutuhan dukungan teknis, sharing informasi, atau penyelarasan program sesuai arah kebijakan Papua Cerdas dan prioritas pembangunan pendidikan di wilayah Papua Barat Daya.
Dokumentasi	

12) Kegiatan 12

Nama Kegiatan	Pertemuan/Koordinasi antara BPP PBD dengan Bupati Maybrat beserta jajaran
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 12 November 2025 di Sekretariat BPP PBD

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Melaksanakan koordinasi bersama Bupati Maybrat dan jajaran terkait isu-isu strategis Kabupaten Maybrat 2. Mengidentifikasi perkembangan keamanan, layanan dasar, serta kebutuhan pembangunan wilayah. 3. Mengumpulkan informasi untuk sinkronisasi perencanaan program daerah dengan kebijakan pusat maupun Provinsi Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota BPP PBD dan seluruh Pokja); Bupati Maybrat dan jajaran
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Papua Produktif dan Papua Polhukam/Damai)
Hasil Kegiatan	1. Situasi keamanan Kabupaten Maybrat relatif membaik, namun wilayah Aifat Timur masih tergolong rawan. Kelompok eksodus menyampaikan kebutuhan atas perhatian pembangunan dan layanan dasar. 2. BP3OKP menekankan pentingnya tata kelola pembangunan sesuai RIPPP dan RAPPP, serta mendorong percepatan program Asta Cita Presiden, seperti MBG, Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. 3. Infrastruktur tetap menjadi kebutuhan utama, khususnya pembangunan jalan nasional Susumuk–Bintuni, Mare–Feeff, akses menuju Aifat Timur dan Aifat Selatan, serta pembangunan jembatan di Aisa. 4. Program MBG berjalan namun terkendala ketersediaan dapur mandiri; diperlukan dukungan investor serta penguatan ketahanan pangan lokal melalui pemanfaatan lahan pertanian di Fuog dan Aifat Timur. 5. Koperasi Merah Putih telah terbentuk di 259 kampung, namun belum memiliki sumber pendanaan yang memadai. 6. Sektor pendidikan dan kesehatan masih menghadapi keterbatasan akibat kekurangan guru, penggunaan gedung sekolah oleh aparat, serta minimnya fasilitas kesehatan di wilayah terpencil.

	7. Usulan pemekaran Distrik Fuog dan pemulihan fasilitas umum pasca-konflik menjadi prioritas untuk meningkatkan pelayanan publik. 8. Pemda Maybrat dan BP3OKP bersepakat menindaklanjuti penyusunan usulan untuk Kemenhan dan kementerian/lembaga terkait, mencakup kebutuhan infrastruktur, keamanan, listrik, dan perumahan.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan Asisten II Setda Kabupaten Maybrat terkait usulan pemekaran Distrik Fuog dan pembangunan jembatan di Kampung Aisa, termasuk penyerahan dokumen usulan Pemda untuk digunakan dalam penyusunan telaahan dan surat kepada Kemenhan dan kementerian/lembaga terkait. 2. Pemda Maybrat menginventarisasi wilayah terdampak bencana untuk dimasukkan dalam perencanaan daerah guna penyelarasan dengan program penanggulangan bencana pusat dan daerah. 3. Pemda Maybrat, dengan pendampingan BP3OKP, segera menyusun surat terkait kendala fiskal serta usulan program penunjang pembangunan, termasuk pengembangan infrastruktur. 4. Pemda dapat memanfaatkan skema Inpres Jalan Daerah; konsep surat akan ditembuskan kepada Menteri Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono. 5. Mengusulkan pembangunan Perumahan Layak Huni bagi masyarakat sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan dan layanan dasar.
Dokumentasi	



13) Kegiatan 13

Nama Kegiatan	Keikutsertaan BPP dalam kegiatan Pelatihan Matematika bagi Guru dan Siswa di Provinsi Papua Barat Daya dengan Metode Gasing
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 12 November 2025 di ACC Aimas
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan keikutsertaan BPP: 1. Meninjau proses pembiasaan penggunaan Metode GASING pada guru dan siswa. 2. Menginisiasi diskusi awal terkait peluang kolaborasi GASING dengan Sistem Sekolah Harapan (SSH). 3. Mengidentifikasi potensi integrasi metode pembelajaran untuk peningkatan numerasi siswa di Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota BPP PBD dan Pokja Cerdas); Pemda PBD; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Hasil Kegiatan	1. Telah dipahami bahwa GASING merupakan metode atau cara belajar, sedangkan SSH adalah sistem pendidikan yang menempatkan intervensi pada proses pembelajaran inklusif.

	2. Pembiasaan GASING dapat diterapkan pada lokus SSH tanpa mengurangi esensi kedua pendekatan, bahkan berpotensi saling menguatkan untuk peningkatan IQ, EQ, dan SQ siswa penerima manfaat. 3. Kolaborasi dapat dimulai melalui peningkatan kapasitas guru matematika pada lokus SSH maupun guru yang telah mengikuti pelatihan GASING. 4. Intervensi numerasi dianjurkan dilakukan terpusat pada satuan pendidikan (school-based), bukan pada campuran guru dari berbagai sekolah, untuk efektivitas peningkatan SPM Numerasi. 5. Penetapan lokus intervensi idealnya mengacu pada hasil analisis Rapor Pendidikan.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Mengadakan pertemuan lanjutan antara tim SSH dan tim GASING, serta melibatkan guru-guru terlatih, untuk membahas konsep integrasi lebih mendalam. 2. Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk mendorong perencanaan pelaksanaan GASING yang berbasis pada analisis Rapor Pendidikan dan/atau selaras dengan program percepatan yang didanai Dana Otsus.
Dokumentasi	



14) Kegiatan 14

Nama Kegiatan	Koordinasi Pokja Papua Sehat BPP dengan Kemenkes RI: Persiapan Pembentukan dan Integrasi Layanan Public Safety Center (PSC) 119 dengan Sistem Layanan Darurat Nasional 112 di Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis-Minggu, 13-16 November 2025 di Kantor Kemenkes Jakarta
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Melakukan konsultasi dan koordinasi teknis dengan Kementerian Kesehatan RI terkait integrasi Layanan Darurat Nasional 112 ke dalam Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan Call Center 119, sebagai bagian dari pembangunan layanan tanggap darurat terintegrasi di Papua Barat Daya. 2. Mengidentifikasi kebutuhan sarana-prasarana, SDM kesehatan, mekanisme operasional, serta jejaring rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan Public Safety Center (PSC) 119 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 3. Memperkuat koordinasi lintas sektor antara Kemenkes, Kominfo, BPBD, serta Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membangun sistem tanggap darurat terpadu (medical dan non-medical) di Papua Barat Daya.

	4. Menyusun rekomendasi rencana aksi (action plan) pembentukan dan pengoperasian PSC 119 yang terintegrasi dengan kebijakan Papua Sehat dalam RIPPP, sekaligus mendukung penguatan Emergency Medical Service (EMS) nasional.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Sehat); Kemenkes RI-Pusat Krisis Kesehatan
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	1. Telah diperoleh pemahaman bersama bahwa PSC 119 merupakan sistem layanan kegawatdaruratan terpadu yang diharapkan dapat menjadi layanan utama bagi masyarakat Papua Barat Daya yang membutuhkan penanganan cepat dan terkoordinasi. 2. Kemenkes memberikan arahan teknis terkait integrasi layanan 112 dan 119, serta kesiapan daerah dalam membangun sistem SPGDT dan jaringan rujukan. 3. Pokja Papua Sehat dan Kemenkes menyepakati perlunya sinkronisasi kebijakan pusat–daerah serta penguatan kapasitas daerah untuk pengoperasian PSC 119.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Melaksanakan forum SHEK untuk melakukan koordinasi multi-stakeholder, termasuk perangkat daerah dan instansi pusat yang akan menjadi pengampu PSC 119 di Papua Barat Daya.

Dokumentasi



15) Kegiatan 15

Nama Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Bidang Pendidikan (Misi Papua Cerdas) di Kabupaten Sorong-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 14 November 2025 di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melaksanakan fungsi koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong, dalam rangka memastikan keselarasan implementasi program dengan misi Papua Cerdas dan kebijakan Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Cerdas); Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi dan Evaluasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Hasil Kegiatan	Kegiatan diawali dengan diskusi bersama pimpinan dan jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong, dipimpin oleh Plt. Sekretaris Dinas. Poin-poin pembahasan utama sebagai berikut: 1. Serapan TKD Otsus • Serapan Dana Otsus pada OPD ini telah mencapai 47%. • Dinas berkomitmen untuk meningkatkan realisasi hingga akhir tahun 2025 sesuai jadwal tentatif yang telah ditetapkan. 2. Program Prioritas yang Dibiayai Dana Otsus • Program utama yang didukung Dana Otsus meliputi: a. Sekolah Gratis, b. Program Afirmasi, c. Peningkatan Kualitas Guru. • Sekolah swasta menjadi perhatian khusus dan diharapkan BP3OKP dapat mendorong percepatan pengaktifan Sistem IMUT sebagai bagian dari peningkatan mutu. • Dinas juga menekankan bahwa untuk menjamin kualitas proses belajar mengajar, diperlukan kebijakan pemerintah daerah terkait pemerataan distribusi Guru ASN/P3K. 3. Persiapan Perencanaan Tahun 2026 Dinas mulai melakukan pemetaan kebutuhan program dan penganggaran untuk tahun 2026 agar selaras

	dengan kebijakan provinsi dan rencana percepatan pembangunan pendidikan.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	1. Mendorong pelaksanaan forum SHEK sebagai ruang sinkronisasi perencanaan tahun 2026 dengan RAPPP serta bagian dari evaluasi kinerja tahun 2025. 2. Koordinasi lanjutan untuk memastikan prioritas Otsus pendidikan terintegrasi dalam kebijakan Papua Cerdas dan roadmap pembangunan pendidikan daerah.
Dokumentasi	

16) Kegiatan 16

Nama Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Bidang Pendidikan (Misi Papua Cerdas) di Kota Sorong-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 17 November 2025 di Kantor Dinas Pendidikan Kota Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melaksanakan fungsi evaluasi terhadap serapan dan pelaksanaan Dana Otsus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, serta memastikan keselarasan pelaksanaan program dengan misi Papua Cerdas.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Cerdas); Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi dan Evaluasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Hasil Kegiatan	1. Serapan TKD Otsus • Serapan Dana Otsus telah mencapai 40–50%.

	• Dinas berkomitmen untuk meningkatkan serapan hingga akhir tahun 2025 sesuai jadwal tentatif. 2. Program Prioritas Dana Otsus • Program utama yang dibiayai Dana Otsus mencakup: a. Sekolah Gratis, b. Program Afirmasi, c. Peningkatan Kualitas Guru. • Program-program ini menjadi fokus dalam upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kota Sorong. 3. Persiapan Perencanaan Tahun 2026 4. Dinas telah memulai proses perencanaan 2026, dengan mengacu pada RPJMD Kota Sorong. 5. Disampaikan bahwa harmonisasi perencanaan dengan RIPPP (Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua) telah dilakukan. 6. Namun, data lengkap terkait perencanaan dan evaluasi hingga laporan ini disusun belum dapat diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Sorong.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Penyampaian surat resmi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong untuk meminta: • Dokumen evaluasi pelaksanaan Otsus tahun 2025, dan • Dokumen perencanaan tahun 2026, termasuk program prioritas dan kebutuhan pendukung. 2. Menyiapkan proses verifikasi dan harmonisasi lebih lanjut setelah dokumen diterima untuk memastikan kesesuaian dengan RAPPP dan kebijakan Papua Cerdas.

Dokumentasi



17) Kegiatan 17

Nama Kegiatan	Kunjungan Kerja dalam rangka Sinkronisasi-Koordinasi-Evaluasi Misi Papua Produktif di Kabupaten Tambrau
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin-Selasa, 17-18 November 2025 di Kabupaten Tambrau
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Melaksanakan koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Tambrau sebagai bagian dari upaya sinkronisasi, dan evaluasi program pembangunan dalam kerangka Misi Papua Produktif sesuai amanat Perpres 24/2023. 2. Melakukan pembahasan teknis terkait progres penyusunan Masterplan Jalan pada lima distrik kawasan konservasi, kesiapan dokumen pendukung, serta kebutuhan koordinasi lintas sektor. 3. Mengumpulkan informasi terkait perkembangan program strategis nasional/daerah seperti MBG, Operasi Merah Putih, SPPG (dapur sehat 3T), dan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari konsolidasi data untuk pelaporan BP3OKP.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Produktif dan Tim Sekretariat); Pemda Kabupaten Tambrau dan OPD Teknis
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Evaluasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	1. Pemerintah Kabupaten Tambrau dan OPD teknis sepakat mempercepat penyusunan Masterplan Jalan 5

	Distrik yang berada dalam kawasan konservasi, dengan penegasan bahwa dokumen harus selesai tahun ini untuk mendukung proses IPPKH di tingkat kementerian. 2. Ditekankan urgensi penerbitan SK Tim/Forum Teknis sebagai dasar legalitas kerja lintas OPD dan syarat utama penilaian kementerian, termasuk untuk mendukung proses revisi RTRW. 3. Disepakati penggunaan peta revisi RTRW sebagai dasar awal overlay rencana jalan sambil menunggu data teknis PU untuk mempercepat proses sinkronisasi tata ruang. 4. BP3OKP menerima update perkembangan program strategis seperti MBG, SPPG, Operasi Merah Putih, dan Koperasi Merah Putih sebagai bahan konsolidasi koordinasi ke tingkat pusat.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Sebagai tindak lanjut, diperlukan penerbitan segera SK Tim/Forum Teknis oleh Pemerintah Kabupaten Tambrau sebagai dasar legalitas proses penyusunan masterplan. OPD teknis seperti PU, Bappeda, dan BPKSDA akan mengumpulkan data dan menyusun dokumen masterplan dalam kurun waktu 1–2 minggu, sementara tim tata ruang diminta segera melakukan overlay rencana jalan dengan peta RTRW revisi agar proses tidak tertunda. Seluruh instansi terkait diminta melakukan update berkala kepada BP3OKP PBD sebagai bagian dari monitoring lintas sektor.
Dokumentasi	



18) Kegiatan 18

Nama Kegiatan	Kunjungan Kerja dalam rangka Sinkronisasi-Koordinasi-Evaluasi Misi Papua Sehat di Kabupaten Raja Ampat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa-Rabu, 18-19 November 2025 di Kabupaten Raja Ampat
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator pembangunan pada Misi Papua Sehat, serta memastikan keselarasan antara pelaksanaan di daerah dengan kebijakan provinsi.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Sehat); Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Evaluasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	1. Beberapa isu strategis masih memerlukan pembahasan lanjutan, namun Kabupaten Raja Ampat memiliki potensi peningkatan layanan kesehatan, meskipun tantangan geografis dan aksesibilitas masih cukup berat. 2. Diperlukan alat transportasi rujukan khusus bagi pasien yang harus dirujuk ke luar wilayah Raja Ampat untuk memastikan layanan kegawatdaruratan yang cepat dan terstandar.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Melaksanakan pengawasan dan pembinaan lanjutan terkait pelaksanaan program Misi Papua Sehat di Kabupaten Raja

	Ampat, termasuk pendalaman terhadap isu prioritas dan kebutuhan fasilitas rujukan.
Dokumentasi	 Kabupaten Raja Ampat KIOS SALSA Yayasan dan Panti Asuhan Cahaya Al... Google Distrik Kota Waisai Papua Barat Daya Indonesia 2025-11-18(Sel) 18:06

19) Kegiatan 19

Nama Kegiatan	Koordinasi Pokja Cerdas dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 19 November 2025 di Sekretariat BPP PBD
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Menjalin komunikasi dan koordinasi antara Pokja Papua Cerdas BPP PBD dan Dinas Pendidikan Sorong Selatan. 2. Memperbarui informasi terkait pelaksanaan program pendidikan di daerah, termasuk progres serapan, kegiatan prioritas, dan kebutuhan dukungan teknis.

	3. Mengidentifikasi potensi sinergi dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program bidang pendidikan sesuai arah kebijakan Papua Cerdas.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota BPP PBD dan Pokja Cerdas); Staf Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Hasil Kegiatan	1. Terjadi pertukaran informasi mengenai kondisi umum pelaksanaan program pendidikan di Sorong Selatan, termasuk capaian, hambatan, dan kebutuhan tindak lanjut dari pemerintah provinsi maupun BPP. 2. Teridentifikasi perlunya penguatan komunikasi rutin antara Pokja dan Dinas Pendidikan agar perencanaan 2026 lebih sinkron dengan arah kebijakan Papua Cerdas serta mendukung penyelarasan dengan RIPP. 3. Pokja dan Dinas sepakat untuk melanjutkan koordinasi teknis pada waktu berikutnya untuk membahas isu-isu yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Sebagai tindak lanjut, Pokja Papua Cerdas akan menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan Dinas Pendidikan Sorong Selatan untuk membahas kebutuhan teknis yang dapat diharmonisasikan dengan program provinsi. Pokja juga akan mengoordinasikan informasi awal yang diperoleh dalam pertemuan ini sebagai bagian dari proses sinkronisasi perencanaan dan evaluasi rutin, sehingga dukungan yang diberikan ke kabupaten dapat lebih terarah dan sesuai prioritas pembangunan pendidikan di wilayah tersebut.
Dokumentasi	

20) Kegiatan 20

Nama Kegiatan	Koordinasi BPP dengan DJPb Papua Barat terkait Permintaan Data LKPD
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 19 November 2025 di Sekretariat BPP PBD
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Melakukan koordinasi dengan DJPb Papua Barat terkait kebutuhan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 2. Memastikan proses permintaan dan penyediaan data berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. 3. Mendukung penguatan analisis dan sinkronisasi program BPP melalui ketersediaan data keuangan daerah yang akurat.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota BPP PBD dan Pokja Cerdas); Tim Kanwil DJPb Papua Barat; Kepala KPPN Sorong
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP – Tata Kelola
Hasil Kegiatan	1. DJPb Papua Barat memberikan penjelasan mengenai prosedur dan batasan dalam penyampaian data LKPD. 2. Disampaikan bahwa data tertentu dapat diberikan setelah melalui mekanisme permohonan yang sesuai dengan regulasi pengelolaan informasi keuangan negara. 3. DJPb menyatakan dukungan untuk membantu penyediaan data yang diperlukan sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan kewenangan.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Melakukan koordinasi lanjutan apabila diperlukan klarifikasi terkait jenis data dan peruntukannya. 2. Mengintegrasikan data yang diperoleh dalam proses analisis dan penyusunan rekomendasi BPP Papua Barat Daya.



21) Kegiatan 21

Nama Kegiatan	Rapat Paripurna DPR Papua Barat Daya Masa Sidang III Tahun 2025: Pembahasan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 19 November 2025 di Vega Hotel Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Menghadiri undangan Rapat Paripurna DPRPBD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026. 2. Mengamati proses pembahasan anggaran sebagai bagian dari fungsi monitoring dan koordinasi pelaksanaan program pembangunan di Papua Barat Daya. 3. Mendukung sinkronisasi antara kebijakan anggaran daerah dan prioritas pembangunan (yang selaras dengan RIPPP) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan provinsi.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota BPP PBD); DPR PBD; Forkopimda PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif) dan Papua Polhukam/Damai

Hasil Kegiatan	1. DPR Papua Barat Daya dan Pemerintah Daerah melanjutkan pembahasan menyeluruh terkait struktur APBD, termasuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2026. 2. Proses pembahasan berjalan kondusif dan menjadi bagian dari rangkaian finalisasi menuju penetapan APBD TA 2026. 3. BPP mencermati poin-poin strategis untuk memastikan keselarasan dengan agenda pembangunan khususnya terkait Otsus dan program prioritas daerah sebagaimana mengacu pada RIPP.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Melakukan analisis internal terhadap hasil pembahasan APBD 2026 untuk memastikan sinkronisasi dengan RIPP/RAPP dan agenda prioritas BPP. 2. Menyiapkan catatan dan rekomendasi apabila diperlukan dalam proses penyempurnaan dokumen anggaran. 3. Melakukan pemantauan lanjutan terhadap tahap finalisasi dan penetapan APBD 2026.
Dokumentasi	-

22) Kegiatan 22

Nama Kegiatan	Workshop Renstra UPT RSUD Kabupaten Raja Ampat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 20 November 2025 di UPT RSUD Kabupaten Raja Ampat
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program layanan dan operasional di RSUD Kabupaten Raja Ampat. 2. Melakukan pendampingan awal dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) rumah sakit.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Sehat); UPT RSUD Kabupaten Raja Ampat
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Evaluasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat

Hasil Kegiatan	1. Diperoleh data awal sebagai bahan evaluasi mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi RSUD dalam pelaksanaan program dan layanan. 2. Disampaikan materi terkait dasar-dasar penyusunan Renstra sebagai pedoman bagi tim RSUD dalam menyiapkan dokumen perencanaan strategis.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. RSUD Kabupaten Raja Ampat diharapkan menindaklanjuti proses administrasi dan teknis untuk pengurusan peningkatan tipe rumah sakit. 2. BPP akan melakukan evaluasi lanjutan untuk memastikan perkembangan penyusunan Renstra dan tindak lanjut rekomendasi sebelumnya.
Dokumentasi	

23) Kegiatan 23

Nama Kegiatan	Facilitasi Pertemuan/Koordinasi BPKAD PBD-Kanwil DJPb Papua Barat-KPPN Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 20 November 2025 di Sekretariat BPP PBD
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Memfasilitasi koordinasi antara BPKAD Provinsi Papua Barat Daya, Kanwil DJPb Papua Barat, dan KPPN Sorong terkait isu teknis pengelolaan keuangan daerah. 2. Mendukung penyelarasan informasi dan mekanisme kerja agar proses pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih efektif dan sesuai ketentuan.

	3. Mengidentifikasi kebutuhan data, regulasi, dan dukungan teknis yang diperlukan oleh Pemerintah Provinsi untuk optimalisasi tata kelola keuangan.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota BPP PBD); BPKAD PBD; Kanwil DJPb PB; KPPN Sorong
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Tata Kelola
Hasil Kegiatan	1. Terlaksana pertukaran informasi terkait prosedur pengelolaan keuangan, penyaluran dana, serta mekanisme pelaporan yang menjadi kewenangan masing-masing instansi. 2. DJPb dan KPPN Sorong memberikan masukan mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh pemerintah provinsi agar pengelolaan anggaran semakin tertib dan sesuai regulasi. 3. Pertemuan berjalan konstruktif sebagai bagian dari upaya meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Melaksanakan koordinasi lanjutan untuk memperjelas mekanisme penyampaian data dan pelaporan. 2. Mengintegrasikan hasil koordinasi dalam peningkatan tata kelola anggaran dan evaluasi pelaksanaannya di tingkat provinsi.
Dokumentasi	

24) Kegiatan 24

Nama Kegiatan	Pendampingan BPP terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya: Koordinasi dengan Kemenko PMK
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 20 November 2025 di Kantor Kemenko PMK Jakarta
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Mendampingi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya dalam koordinasi terkait implementasi kebijakan pendidikan vokasi. 2. Melaksanakan fungsi koordinasi dan harmonisasi atas pelaksanaan Perpres 68 Tahun 2023 dan Permenko PMK Nomor 05 Tahun 2023 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Cerdas); Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PBD; Kemenko PMK RI
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi dan Harmonisasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Hasil Kegiatan	1. Kemenko PMK menyatakan dukungan terhadap rencana Revitalisasi Pendidikan Vokasi di Papua Barat Daya, serta mendorong dilakukannya koordinasi teknis lanjutan dengan Kementerian/Lembaga terkait, khususnya Kemendikti Saintek. 2. Revitalisasi pendidikan vokasi diharapkan dilaksanakan secara menyeluruh, termasuk penguatan aspek pelatihan vokasi sebagai bagian dari sistem pendidikan vokasi terpadu. 3. Optimalisasi Tim Koordinasi Vokasi Daerah (TKVD) perlu dilaksanakan sesuai amanat Permenko PMK Nomor 05 Tahun 2023 dan Permenko PMK Nomor 06 Tahun 2026 tentang Stranas. Papua Barat Daya merupakan salah satu dari enam provinsi di Tanah Papua yang telah membentuk TKVD.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Melaksanakan koordinasi teknis dengan Direktorat Jenderal Kelembagaan Kemendikti Saintek RI dalam

	rangka menindaklanjuti agenda revitalisasi pendidikan vokasi. 2. Menginisiasi pertemuan untuk pembentukan dan penguatan TKVD di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota di Papua Barat Daya.
Dokumentasi	 

25) Kegiatan 25

Nama Kegiatan	Pendampingan BPP terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya: Koordinasi dengan Kemendiknasaintek (Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 21 November 2025 di Kantor Kemendiknasaintek Jakarta
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Melaksanakan pendampingan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat

	Daya dalam rangka rencana Revitalisasi Pendidikan Vokasi. 2. Melaksanakan fungsi koordinasi dengan Kementerian/Lembaga teknis terkait keterpaduan pelaksanaan program vokasi di Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Cerdas); Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PBD; Kemendiktisaintek-Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Hasil Kegiatan	1. BPP PBD bersama Dinas Pendidikan mendapatkan arahan teknis dari Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan terkait langkah-langkah percepatan Revitalisasi Pendidikan Vokasi di Papua Barat Daya. 2. Diperoleh arahan agar update data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) segera dilakukan, sehingga operasional program studi terkait dapat dilaksanakan pada Tahun Akademik 2026. 3. Koordinasi berjalan dengan baik dan membuka ruang tindak lanjut lintas lembaga, termasuk sinergi bersama perguruan tinggi di Papua Barat Daya.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Melaksanakan koordinasi lanjutan dengan Tim Universitas Papua (Unipa) dan Dinas Pendidikan PBD terkait kelengkapan dan pembaruan data pada PDDikti. 2. Mendukung persiapan tahapan penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2026, sehingga program studi vokasi yang direvitalisasi dapat segera beroperasi.
Dokumentasi	



26) Kegiatan 26

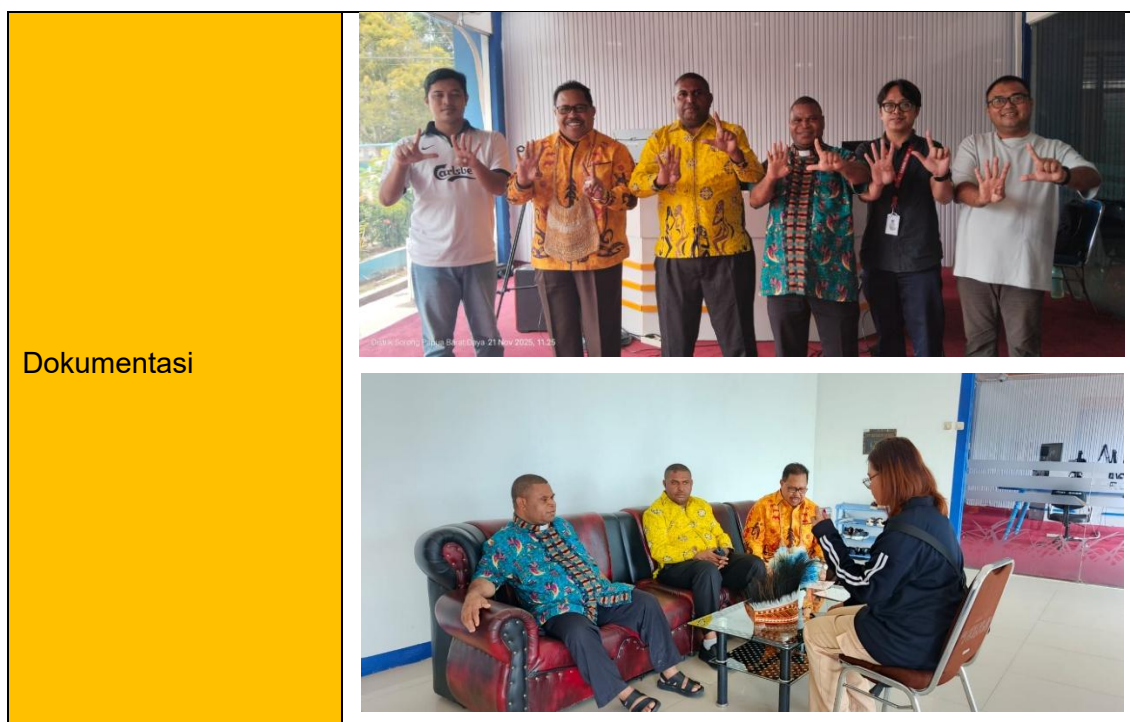
Nama Kegiatan	Upacara Peringatan Hari Otonomi Khusus ke-24
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 21 November 2025 di Halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Memperingati Hari Otonomi Khusus ke-24 sebagai momentum refleksi dan evaluasi pelaksanaan Otsus di Tanah Papua. 2. Meningkatkan semangat persatuan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah berbasis kearifan lokal. 3. Memperkuat komitmen pemerintah provinsi dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus serta percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota BPP PBD dan Pokja Produktif); Forkopimda PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Harmonisasi
Misi/Keterangan	RIPPP - (Tata Kelola Otsus)
Hasil Kegiatan	1. Upacara peringatan berlangsung dengan khidmat dan tertib, diikuti oleh unsur Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Forkopimda, perangkat daerah, pelajar, dan perwakilan masyarakat. 2. Gubernur Papua Barat Daya menyampaikan amanat serta optimalisasi dana Otsus untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

	3. Pelaksanaan upacara menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas, memperkuat identitas kultural, dan memajukan pembangunan melalui mekanisme Otonomi Khusus.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Mendorong perangkat daerah terkait untuk meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan, pelaporan, dan evaluasi pemanfaatan dana Otonomi Khusus. 2. Memperkuat sosialisasi terkait hak-hak masyarakat Papua dan optimalisasi program Otsus di kabupaten/kota se-Papua Barat Daya.
Dokumentasi	 

27) Kegiatan 27

Nama Kegiatan	Dialog Kita Bisa: 24 Tahun Otonomi Khusus Papua Menuju Tanah Papua Cerdas, Sehat dan Produktif
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 21 November 2025 di Studio Pro1 RRI Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Atas permintaan RRI Sorong, BPP PBD hadir sebagai narasumber dialog publik 24 Tahun Otsus Papua. 2. Mengevaluasi pelaksanaan Otsus dalam konteks Papua Barat Daya, khususnya layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.

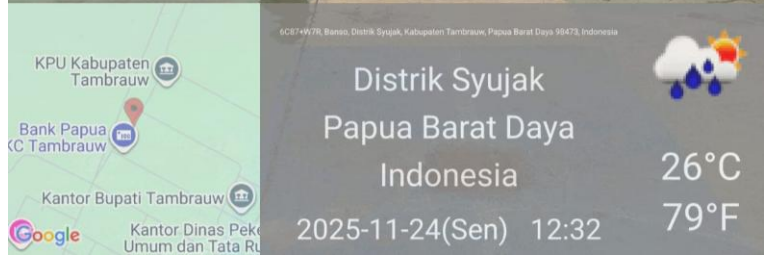
	3. Mensosialisasikan visi Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif sesuai tema Otsus 2025, yang sejalan dengan RIPPP. 4. Menampung aspirasi publik dan merumuskan masukan strategis untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan Otsus.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota BPP PBD dan Pokja Produktif); Tokoh Agama/Masyarakat Adat; RRI Sorong
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	SHEK
Misi/Keterangan	RIPPP (Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif)
Hasil Kegiatan	1. Peserta dialog sepakat bahwa Otsus masih menjadi instrumen penting percepatan pembangunan Papua. 2. Capaian positif: peningkatan pendidikan melalui beasiswa, penguatan UMKM, dan layanan publik yang mulai membaik. 3. Tantangan utama: rendahnya serapan anggaran Otsus (banyak OPD <60%), sehingga perlu perbaikan tata kelola dan kualitas belanja. 4. Forum menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan partisipatif bersama MRP dan masyarakat. 5. Tersampaikan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antar sektor guna mewujudkan Papua Cerdas–Sehat–Produktif.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Peningkatan Transparansi & Pengawasan terhadap perencanaan dan penggunaan dana Otsus. 2. Memperkuat koordinasi lintas sektor (Pemda, pusat, DPRD, MRP, tokoh adat, masyarakat). 3. Menyusun rencana aksi prioritas untuk Papua Cerdas, Sehat, Produktif dengan indikator kinerja jelas. 4. Penguatan basis data & evaluasi rutin agar kebijakan Otsus lebih terukur. 5. Pemberdayaan kelembagaan Otsus termasuk pelibatan MRP dan koordinasi dengan BP3OKP.



Dokumentasi

28) Kegiatan 28

Nama Kegiatan	Kunjungan Kerja dalam rangka Sinkronisasi-Koordinasi-Evaluasi Misi Papua Sehat di Kabupaten Tambrau
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 24 November 2025 di Kabupaten Tambrau
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program bidang kesehatan berdasarkan indikator Misi Papua Sehat. 2. Melaksanakan sinkronisasi program kesehatan antara provinsi dan kabupaten.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Sehat); Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau; Dinas PPPA Kabupaten Tambrau
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Evaluasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	1. Diperlukan koordinasi lebih kuat antara Kabupaten dan Provinsi terkait pengaturan stok logistik kesehatan. 2. Perencanaan pembangunan layanan kesehatan harus mempertimbangkan akses masyarakat agar layanan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program kesehatan di Kabupaten Tambrau.
Dokumentasi	  

29) Kegiatan 29

Nama Kegiatan	Forum SHEK BPP - BRI: Sosialisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Pelaku Usaha/Koperasi/Masyarakat OAP Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 24 November 2025 di Aula KPPN Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha, koperasi, dan OAP mengenai kebijakan dan mekanisme KUR.

	- Memperluas akses pembiayaan produktif melalui fasilitasi dengan BRI sebagai penyalur KUR. - Mendorong peningkatan literasi keuangan pelaku usaha. - Mengidentifikasi hambatan seperti legalitas usaha, administrasi, dan SLIK merah. - Memperkuat kolaborasi multipihak untuk mendukung Misi Papua Produktif. - Menyinkronkan program pusat–daerah terkait pengembangan UMKM sesuai RIPPP/RAPPP/RPJMN. - Mendorong munculnya pelaku usaha baru dan pengembangan usaha eksisting. - Menyediakan ruang dialog langsung antara pelaku usaha dan BRI untuk solusi konkret.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota BPP PBD dan Pokja Produktif); Forum Lintas Suku Asli Papua (OAP) PBD; Forum Lintas Suku Aifat Timur Kabupaten Maybrat; Pelaku Usaha Masyarakat OAP PBD; BRI Cabang Sorong
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	SHEK
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	- Program KUR BRI dinilai strategis bagi usaha OAP, namun membutuhkan pendampingan intensif. - Penguatan koperasi dan sinkronisasi dengan program MBG, SSH, dan Otsus menjadi kunci peningkatan pasar komoditas lokal. - Kendala legalitas usaha (NIB, NPWP) dan SLIK merah masih dominan dan membutuhkan fasilitasi pemerintah. - Perlu pengembangan sistem pemasaran terintegrasi bersama perusahaan (tambang, LNG, sawit). - Keterbatasan akses layanan BRI di Maybrat membutuhkan advokasi pembukaan kantor BRI.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	- Melaksanakan pendampingan intensif kepada pelaku usaha OAP dalam pemanfaatan KUR. - Mendorong penguatan koperasi serta sinkronisasi program MBG, SSH, dan Otsus.

	3. Fasilitasi penyelesaian masalah legalitas usaha serta perbaikan SLIK merah. 4. Inisiasi sistem pemasaran terintegrasi dengan perusahaan besar. 5. Advokasi pembukaan layanan/kantor BRI di Kabupaten Maybrat.
Dokumentasi	 

30) Kegiatan 30

Nama Kegiatan	Rapat Satgas MBG Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 24 November 2025 di Aula Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Menghadiri rapat sebagai bagian dari Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Papua Barat Daya. 2. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam rangka percepatan pelaksanaan Program MBG di seluruh kabupaten/kota.

	3. Mendapatkan pembaruan informasi dan arah kebijakan terkait langkah strategis, persiapan rakerda, serta isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti Satgas MBG.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota BPP PBD dan Pokja Produktif); Satgas MBG PBD; Pemda PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif)
Hasil Kegiatan	1. Pembahasan Langkah-Langkah Strategis Percepatan MBG Forum mendiskusikan strategi pendukung untuk memperkuat implementasi MBG, termasuk integrasi pangan lokal, peningkatan peran PPL dan petani OAP, penguatan SOP, serta kebutuhan koordinasi lintas OPD dan kabupaten/kota. 2. Persiapan Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) MBG Tahun 2026 Dibahas persiapan penyelenggaraan Rakerda MBG Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026, mulai dari agenda, peserta, materi pembahasan, hingga output yang diharapkan sebagai pedoman pelaksanaan MBG di tahun berikutnya. 3. Hal-Hal Lain yang Dianggap Perlu Forum juga membahas isu teknis pelaksanaan, termasuk tantangan logistik, kebutuhan perbaikan data penerima manfaat, sinkronisasi peran Satgas kabupaten, serta urgensi koordinasi terkait keberlanjutan dapur MBG, suplai pangan, dan dukungan anggaran.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Sebagai tindak lanjut, Satgas MBG akan menyempurnakan langkah strategis percepatan implementasi program melalui koordinasi lintas sektor dan konsolidasi data di seluruh kabupaten/kota. Persiapan teknis Rakerda MBG Tahun 2026 akan segera difinalisasi, termasuk penyusunan agenda dan materi substansi. Selain itu, BPP PBD sebagai bagian dari Satgas akan memastikan sinkronisasi kebijakan

	dan memberikan dukungan koordinatif dalam penyelesaian isu-isu teknis seperti suplai pangan lokal, penetapan SOP, penguatan peran Satgas daerah, serta pemutakhiran data penerima manfaat.
Dokumentasi	 

31) Kegiatan 31

Nama Kegiatan	Kunjungan Kerja dalam rangka Sinkronisasi-Koordinasi-Evaluasi Misi Papua Produktif di Kabupaten Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 25 November 2025 di Kabupaten Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Sinkronisasi data terpilah OAP dan penyelarasan definisi, metodologi, serta mekanisme pembaruan data. 2. Memperkuat koordinasi pelaksanaan program MBG, termasuk SOP, distribusi pangan lokal, dan fungsi Satgas. 3. Mengidentifikasi potensi–kendala Koperasi Merah Putih serta strategi penguatan kelembagaan dan pembiayaan. 4. Mendorong harmonisasi kebijakan dan integrasi program lintas sektor dalam kerangka Papua Produktif.

	5. Menyusun rekomendasi dan RTL untuk percepatan implementasi program secara terukur.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Produktif); Pemda Kabupaten Sorong dan OPD Teknis; SPPG dan UMKM wilayah Kabupaten Sorong
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Evaluasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	1. Disepakati penyusunan data terpilah OAP Kabupaten Sorong secara terstandar, melibatkan Dukcapil dan OPD terkait. 2. Satgas MBG siap memperbaiki mekanisme koordinasi, SOP, dan integrasi pangan lokal. 3. Koperasi Merah Putih dinilai strategis namun masih membutuhkan penguatan kelembagaan, pendampingan bisnis, data komoditas, dan pembiayaan. 4. Terbangun komitmen kolaborasi pemerintah kabupaten, BP3OKP, OPD sektoral, koperasi, lembaga adat, dan pelaku ekonomi lokal. 1. Kunjungan memberikan gambaran kesiapan kabupaten dalam mengakselerasi Misi Papua Produktif secara terukur.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. BP3OKP memimpin sinkronisasi lintas sektor agar program pangan lokal, ekonomi rakyat, dan afirmasi sosial selaras dengan RIPP/ RPJMN/prioritas daerah. 2. Standardisasi dan integrasi data terpilah OAP secara sistematis sebagai dasar perencanaan afirmatif. 3. Penguatan Satgas MBG melalui penyusunan SOP, pengawasan pelaksanaan, dan integrasi pangan lokal dalam menu MBG. 4. Pendampingan penguatan Koperasi Merah Putih, pemetaan komoditas unggulan, dan fasilitasi kemitraan dengan UMKM serta sektor swasta. 5. Mendorong pembiayaan dan investasi produktif bagi OAP melalui koordinasi dengan K/L, BUMN, dan mitra strategis.

	6. Penyusunan roadmap Papua Produktif Kab. Sorong serta pelaksanaan monev triwulanan. 7. Penguatan kapasitas penyuluh, pendamping koperasi, dan Satgas MBG sebagai kunci implementasi. 8. BP3OKP bertindak sebagai platform konsolidasi multi-stakeholder untuk memastikan dampak nyata bagi kesejahteraan OAP.
Dokumentasi	 A photograph showing four individuals (three men and one woman) standing in front of a wooden structure. Above them is a banner that reads 'UMKM Binaan BRI D Papua Jamur'. The banner also features the BRI logo and a picture of a man. The three men are holding white bags, likely containing mushrooms, and the woman is standing to the right.

32) Kegiatan 32

Nama Kegiatan	Launching Data OAP Kabupaten Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 26 November 2025 di Hotel Aimas Kab Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Menghadiri undangan launching sebagai bentuk dukungan dan fungsi koordinasi BPP PBD di wilayah provinsi.

	- Memastikan bahwa Database Induk OAP Kabupaten Sorong telah disusun sesuai prinsip pembangunan afirmatif dan sejalan dengan arah kebijakan RIPPP - Melakukan fungsi pengawasan koordinatif agar data OAP dapat digunakan sebagai dasar program strategis yang mendukung Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Berkarakter. - Menjamin sinkronisasi data kabupaten dengan data provinsi dan platform integrasi BP3OKP/BPP PBD. - Mendorong pemanfaatan data OAP sebagai basis perencanaan program afirmasi dan integrasi lintas sektor di Kabupaten Sorong.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Produktif); Pemda Kabupaten Sorong; Disdukcapil Kabupaten Sorong; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif) dan Papua Polhukam/Damai
Hasil Kegiatan	- Kabupaten Sorong resmi memiliki Database Induk OAP yang telah diverifikasi dan menjadi sumber data resmi daerah. - Tersedia data terpilah dan terstandar yang dapat digunakan untuk perencanaan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, dan pemberdayaan sosial. - Terbangun pemahaman antar-OPD mengenai pentingnya satu sumber data OAP dan standarisasi penggunaan data. - BPP PBD mencatat bahwa proses penyusunan data telah mengacu pada prinsip RIPPP, khususnya integrasi data afirmasi. - Launching menjadi momentum penguatan tata kelola data yang transparan, akurat, dan terintegrasi.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Membentuk Tim Pengelola Data OAP Kabupaten Sorong untuk pembaruan data berkala (semesteran/tahunan).

	- Integrasi data OAP. - Memfaatkan data OAP sebagai basis sasaran program MBG, beasiswa afirmasi, Papua Produktif, kampung adat, dan bantuan kewirausahaan OAP. - Melakukan sinkronisasi data dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan BP3OKP secara rutin. - Menyusun Roadmap Penguatan Data OAP 2025–2030, mencakup digitalisasi dan integrasi lintas sektor. - Melaksanakan monitoring dan evaluasi triwulanan terhadap dinamika data OAP, terutama perubahan demografi dan mobilitas penduduk.
Dokumentasi	

33) Kegiatan 33

Nama Kegiatan	Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Kerja Badan Pengarah Papua dan Komite Eksekutif Tahun 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu-Jum'at, 26-28 November 2025 di Jakarta
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	- Menghadiri undangan rapat koordinasi dan melakukan pembahasan bersama terkait penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP/BPP), Komite Eksekutif, dan Sekretariat Badan Pengarah Papua. - Menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi antara Badan Pengarah, Komite Eksekutif, dan Sekretariat dalam mendukung percepatan pembangunan Otsus sesuai mandat UU Otsus, RIPPP, RAPPP, dan SIPPP.

	3. Memastikan bahwa pelaksanaan program tahun 2026 mengikuti prinsip integritas, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.
Peserta Kegiatan	Anggota BPP; Sekretariat BPP Jayapura dan Manokwari; Sekretaris BPP; Komite Eksekutif PPP
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	SHEK
Misi/Keterangan	BPP
Hasil Kegiatan	1. Berdasarkan pembahasan bersama, rapat menghasilkan beberapa kesepakatan pokok sebagai berikut: 2. Semua unsur (Badan Pengarah, Komite Eksekutif, dan Sekretariat) berkomitmen melaksanakan tugas fungsi percepatan pembangunan Otsus Papua secara terarah, mengutamakan substansi yang relevan dan tepat sasaran, melalui mekanisme Sinkronisasi–Harmonisasi–Evaluasi–Koordinasi (SHEK), serta sejalan dengan RIPPP, RAPPP, dan SIPPP. 3. Seluruh pihak sepakat menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan. 4. Pelaksanaan tugas diarahkan menjadi lebih efektif melalui perencanaan terukur dan kegiatan yang tepat waktu, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Optimalisasi efisiensi dalam penggunaan SDM, anggaran, dan sarpras menjadi prioritas kerja bersama. 6. Sekretaris Badan Pengarah Papua melalui sekretariat wilayah (Jayapura, Manokwari, dan DOB masing-masing) akan memberikan dukungan penuh dan fasilitasi kegiatan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Sebagai tindak lanjut kesepakatan bersama, seluruh unsur Badan Pengarah Papua, Komite Eksekutif, serta Sekretariat akan menyusun rencana kerja yang selaras dengan RIPPP dan RAPP, dan memastikan setiap program tahun 2026

	mengacu pada prinsip sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi lintas wilayah Papua. Pelaksanaan kegiatan akan diperkuat melalui mekanisme pemantauan SHEK secara berkala untuk menjaga integritas, transparansi, serta efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya. Sekretariat wilayah (Jayapura, Manokwari, dan DOB) akan menyiapkan dukungan administratif dan fasilitasi teknis untuk memastikan seluruh proses perencanaan, koordinasi, dan pelaporan berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Dokumentasi	

34) Kegiatan 34

Nama Kegiatan	Rapat Koordinasi Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Wilayah Papua
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu-Jum'at, 26-28 November 2025 di Swiss Bell Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Wilayah Papua. 2. Melaksanakan fungsi koordinasi SHEK (Sosial, Humana, Ekonomi, Kelembagaan) antara BPP, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya. 3. Memastikan pembahasan penugasan tenaga kesehatan selaras dengan kebijakan afirmatif dan prinsip pemerataan dalam RIPPP serta misi Papua Sehat. 4. Mengidentifikasi kebutuhan daerah dan mengadvokasi isu-isu strategis Papua Barat Daya terkait pengadaan, penempatan, dan pendayagunaan SDM. 5. Memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung layanan kesehatan dasar dan rujukan yang lebih efektif di wilayah PBD.
Peserta Kegiatan	BPP (Pokja Sehat 6 Provinsi); Kemenkes; Dinas Kesehatan se-wilayah Papua
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	1. Menguatnya pandangan bersama bahwa Papua memerlukan “special treatment” dalam pengadaan, distribusi, dan pemenuhan SDM Kesehatan (SDMK) mengingat kondisi geografis, aksesibilitas, dan tantangan sosial-kultural. 2. Isu keamanan masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi penempatan dan keberlangsungan tugas tenaga kesehatan di sejumlah wilayah. 3. Ditekankan pentingnya penginputan data SDM yang akurat sesuai kondisi eksisting, karena data yang tidak valid akan berdampak langsung pada perencanaan, pendayagunaan, dan proses penugasan.

	4. Tercipta kesepahaman antara Kemenkes, pemerintah daerah, dan lembaga terkait mengenai langkah akselerasi pemenuhan SDMK di wilayah Papua. 5. BPP PBD berhasil menyampaikan perspektif wilayah dan kebutuhan khusus Papua Barat Daya dalam forum nasional.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Menyusun Roadmap Perencanaan SDMK Papua 2025–2030, mencakup: kebutuhan SDMK, mekanisme rekrutmen afirmatif, distribusi dan penempatan berbasis risiko, 2. insentif wilayah khusus, serta pendayagunaan jangka panjang. 3. Melakukan koordinasi lanjutan antara BPP, Dinas Kesehatan PBD, dan Kemenkes mengenai mekanisme penugasan khusus, terutama untuk distrik/kampung prioritas. 4. Mendorong peningkatan kualitas dan integrasi sistem data SDMK, termasuk penanggung jawab pembaruan data di masing-masing tingkatan. 5. Mengawal advokasi kebutuhan insentif tambahan dan dukungan keamanan bagi tenaga kesehatan di wilayah rawan. 6. Melakukan monitoring bersama atas implementasi penugasan khusus dan pelaporan SDMK di Papua Barat Daya secara berkala.
Dokumentasi	



35) Kegiatan 35

Nama Kegiatan	Kunjungan Kerja dalam rangka Sinkronisasi-Koordinasi-Evaluasi Misi Papua Produktif di Kabupaten Raja Ampat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis-Jum'at, 27-28 November 2025 di Kabupaten Raja Ampat
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Untuk melakukan koordinasi, evaluasi, dan sinkronisasi antara BP3OKP dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terkait pendataan OAP, penyerapan dana Otsus, serta pelaksanaan program strategis seperti MBG dan Koperasi Merah Putih, sehingga program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran dan berbasis data yang akurat.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Produktif); Pemda Kabupaten Raja Ampat dan OPD Teknis
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Evaluasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	1. Pendataan OAP masih berlangsung dan terkendala faktor geografis serta terbatasnya tenaga pendata. Meskipun demikian, pemerintah daerah menargetkan penyelesaian sebelum 16 Desember 2025. 2. Pengelolaan dan perencanaan Otsus berjalan cukup baik, namun diperlukan peningkatan kualitas laporan dan percepatan penyerapan anggaran.

	3. Pelaksanaan Program MBG belum optimal dalam pemanfaatan pangan lokal serta belum sepenuhnya memberdayakan petani OAP. 4. Ketersediaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sangat terbatas sehingga menghambat penguatan ketahanan pangan lokal. 5. Ditemukan perlunya koordinasi yang lebih kuat antar-OPD untuk mengakselerasi program MBG, Koperasi Merah Putih, dan pembangunan ekonomi OAP. 6. Terkait investor dapur 3T, dibutuhkan keputusan segera untuk memastikan pembangunan dapat diselesaikan dalam batas waktu 45 hari.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Dinas Dukcapil Dinas Dukcapil perlu menyelesaikan pendataan terpilah Orang Asli Papua (OAP) paling lambat pada 16 Desember 2025, dengan mengoptimalkan dukungan jaringan, tim teknis, serta tenaga pendata untuk memastikan percepatan proses. Selain itu, Dinas Dukcapil perlu mempersiapkan pemilahan KTP OAP dan Non-OAP untuk tahun 2026 serta melakukan pembayaran honor aparat kampung dan tenaga pendataan melalui anggaran bantuan Pemprov sebesar Rp500 juta. 2. Bappeda Bappeda diharapkan menyiapkan OPD pengelola Otsus untuk mengikuti kegiatan Interoperabilitas DJPK di Makassar guna memperkuat tata kelola data. Bappeda juga perlu memperkuat integrasi data SIAK–SAIK+ sebagai dasar perencanaan pembangunan yang berbasis data OAP dan mendukung sinkronisasi perencanaan Otsus. 3. Dinas Pertanian Dinas Pertanian perlu mengembangkan program pemberdayaan petani OAP guna memenuhi kebutuhan pangan dalam Program MBG, sekaligus memetakan kebutuhan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan

	mengusulkan penambahan SDM penyuluh. Selain itu, Dinas Pertanian perlu menyusun data pasokan pangan lokal sebagai dasar penentuan intervensi MBG agar lebih tepat sasaran. 4. Satgas MBG Satgas MBG perlu segera mengambil keputusan terkait keberlanjutan investor enam dapur 3T, apakah diganti atau diambil alih oleh BGN. Satgas juga perlu menyusun strategi agar pasokan bahan makanan untuk Program MBG semakin banyak bersumber dari petani lokal, sehingga memperkuat ketahanan pangan berbasis OAP dan mendukung ekonomi masyarakat setempat. 5. BP3OKP Papua Barat Daya BP3OKP Papua Barat Daya perlu melakukan monitoring atas penyerapan dana Otsus dan memberikan rekomendasi peningkatan kualitas laporan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, BP3OKP perlu memfasilitasi koordinasi lintas sektor guna memperkuat pelaksanaan Program MBG dan Koperasi Merah Putih, serta memastikan integrasinya ke dalam kerangka Papua Produktif secara menyeluruh.
Dokumentasi	

2.2 Capaian

Selama bulan November 2025, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan rangkaian kegiatan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan evaluasi (SHEK) pada enam provinsi di Tanah Papua, dengan fokus utama pada tiga misi besar Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, serta didukung penguatan tata kelola Otsus dan kondisi perlu lainnya. Secara umum, capaian pelaksanaan tugas dan fungsi pada bulan ini menunjukkan capaian sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Otsus dan Perencanaan Daerah

Selama bulan November, BP3OKP PBD memperkuat koordinasi dengan BPKAD, DJPb, DPRD, dan OPD teknis dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Dana Otsus. Hadirnya BPP dalam berbagai forum APBD, permendagri, dan monitoring serapan Otsus di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong menghasilkan pemahaman yang lebih seragam tentang prioritas belanja, peningkatan ketertiban administrasi, serta penyelarasan perencanaan 2026 dengan RIPPP. Upaya harmonisasi lintas sektor membantu memperbaiki kualitas dokumen perencanaan serta memperkuat mekanisme pengawasan agar serapan anggaran dapat meningkat dan tepat sasaran. Secara umum, pilar ini memperlihatkan peningkatan signifikan pada aspek tata kelola, konsistensi pelaporan, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan BP3OKP.

2. Penguatan Pendidikan – Papua Cerdas

Selama bulan November, rangkaian kegiatan pokja pendidikan difokuskan pada integrasi Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) dengan Metode Gasing sebagai strategi peningkatan mutu numerasi dan pembelajaran dasar di Papua Barat Daya. Koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota—terutama Sorong, Sorong Selatan, dan Kota Sorong—menghasilkan evaluasi langsung terhadap serapan Dana Otsus bidang pendidikan serta penajaman kembali program prioritas seperti sekolah gratis, afirmasi pendidikan, dan peningkatan kualitas guru. Selain itu, BP3OKP mendampingi Pemprov dalam proses revitalisasi pendidikan vokasi, termasuk persiapan pendirian Akademi Komunitas dan validasi data PDD-AKNESS sebagai dasar operasional pendidikan vokasi tahun 2026. Konsolidasi dengan Kemenko PMK, Kemendikstisaintek, dan UNIPA memperkuat arah kebijakan pendidikan daerah agar selaras dengan RIPPP dan kebutuhan riil kabupaten/kota. Secara keseluruhan, Papua Cerdas bulan ini berfokus pada integrasi program pembelajaran, evaluasi Otsus bidang pendidikan, dan pengembangan jalur

pendidikan vokasi yang lebih adaptif untuk OAP dan berorientasi terhadap potensi daerah.

3. Penguatan Layanan dan Sinkronisasi Kebijakan Kesehatan – Papua Sehat

Pelaksanaan tugas bidang kesehatan pada bulan November berfokus pada sinkronisasi, koordinasi, dan evaluasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk memastikan implementasi Otsus kesehatan berjalan sesuai indikator Misi Papua Sehat. Melalui monitoring lapangan di Sorong, Sorong Selatan, dan Raja Ampat, BP3OKP mengidentifikasi kebutuhan peningkatan layanan dasar, termasuk ketersediaan tenaga kesehatan, akses rujukan, eliminasi penyakit prioritas, serta perbaikan tata kelola perencanaan daerah. Di tingkat layanan, pendampingan penyusunan Renstra RSUD Raja Ampat memperkuat arah pembangunan rumah sakit agar selaras dengan standar nasional dan kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, koordinasi intensif dengan Kementerian Kesehatan terkait integrasi layanan PSC 119 dengan sistem darurat nasional menghasilkan pemetaan kebutuhan sarana–prasarana serta mekanisme operasional yang diperlukan provinsi untuk membangun sistem kegawatdaruratan terpadu. BP3OKP juga berperan sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Nakes Papua, yang menegaskan perlunya special treatment dalam pengadaan dan distribusi SDM, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan keamanan. Secara keseluruhan, kegiatan bulan ini memperkuat fondasi pelayanan kesehatan berbasis kebutuhan daerah, integrasi sistem darurat, dan konsistensi pelaksanaan Otsus kesehatan.

4. Penguatan Ekonomi Rakyat – Papua Produktif

Melalui kegiatan seperti Forum KUR BRI, kunjungan produktif di Sorong, Raja Ampat, dan Tambrau, serta pendalaman program MBG dan Koperasi Merah Putih, BP3OKP berhasil memperkuat landasan ekonomi afirmatif bagi OAP. Koordinasi dengan BRI membuka peluang perluasan akses pembiayaan produktif, sambil mengidentifikasi hambatan utama seperti legalitas usaha dan SLIK merah. Kegiatan lapangan menemukan bahwa integrasi pangan lokal dalam MBG masih memerlukan penguatan kapasitas petani dan penyuluh, termasuk pemetaan komoditas unggulan untuk Koperasi Merah Putih. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten menghasilkan komitmen bersama memperkuat jejaring pemasaran, pembinaan UMKM, serta harmonisasi kebijakan lintas sektor. Papua Produktif pada bulan ini menunjukkan kemajuan substansial dalam menyiapkan ekosistem ekonomi OAP yang lebih kuat.

5. Penguatan Data OAP dan Penataan Ruang

Pelaksanaan launching Data OAP Kabupaten Sorong, koordinasi data lintas sektor, serta pembahasan masterplan lima distrik Tambrau menjadi tonggak penting dalam membangun sistem data pembangunan yang akurat dan terintegrasi. Database OAP kini menjadi rujukan resmi untuk afirmasi di sektor pendidikan, kesehatan, pangan lokal, dan ekonomi produktif. Sinkronisasi dengan OPD memperkuat kesiapan kabupaten/kota dalam pemutakhiran data serta pemilahan KTP OAP–Non OAP tahun 2026. Di Tambrau, penyusunan masterplan jalan di kawasan konservasi dan progres revisi RTRW menunjukkan pentingnya koordinasi tata ruang untuk mendukung percepatan pembangunan. Pilar ini memperkuat dasar teknis dan spasial untuk pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Konsolidasi Kelembagaan, Koordinasi Nasional, dan Jejaring Strategis

Melalui Rapat Pleno BP3OKP yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI, koordinasi Komite Eksekutif, dan audiensi lintas kementerian serta perguruan tinggi, BP3OKP memperkuat posisi strategisnya sebagai koordinator atau pengarah. Forum-forum ini menghasilkan konsistensi arah kebijakan pembangunan wilayah Papua (RIPPP), penajaman rencana kerja 2026, dan penguatan peran BP3OKP sebagai simpul koordinasi antara pusat, daerah, dan pemangku kepentingan strategis. Kegiatan-kegiatan ini juga mendorong hubungan konstruktif dengan akademisi, lembaga adat, dan sektor swasta, sekaligus memperluas dukungan untuk percepatan pembangunan Tanah Papua.

Kesimpulan

Pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK selama bulan November 2025 menunjukkan kinerja BP3OKP Papua Barat Daya yang konsisten dan progresif dalam mendorong percepatan pembangunan Papua. Fokus kinerja bulan ini tercermin melalui:

1. **Penguatan tata kelola Otsus dan penyelarasan perencanaan daerah**, termasuk peningkatan kualitas pelaporan, harmonisasi prioritas belanja, serta konsistensi perencanaan 2026 dengan RIPPP.
2. **Peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan dan kesehatan**, melalui integrasi SSH–Gasing, evaluasi serapan Otsus pendidikan, pendampingan pendidikan vokasi, serta sinkronisasi kebijakan kesehatan dengan Dinkes dan Kemenkes, termasuk pengembangan PSC 119 dan Renstra RSUD.

3. **Penguatan ekosistem ekonomi afirmatif dan pangan lokal**, melalui pendalaman program MBG, pembinaan Koperasi Merah Putih, dan fasilitasi akses pembiayaan produktif bagi OAP.
4. **Penguatan data OAP dan penataan ruang**, ditandai dengan launching database OAP Kabupaten Sorong serta percepatan penyusunan masterplan lima distrik Tambrauw sebagai dasar pembangunan berbasis data dan spasial.
5. **Konsolidasi kelembagaan dan koordinasi strategis nasional**, melalui Rapat Pleno BP3OKP bersama Wakil Presiden RI dan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan keselarasan arah pembangunan wilayah Papua sebagaimana diatur dalam RIPP.

BAB III

PENUTUP

Demikian laporan ini disusun dan disampaikan sebagai bentuk realisasi sekaligus pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya, yang diwujudkan melalui rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama bulan November 2025.

Diharapkan laporan ini dapat membawa manfaat bagi BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya dalam evaluasi kinerja dan peningkatan kinerja ke depannya, serta bermanfaat bagi Wakil Presiden RI selaku Ketua Badan Pengarah Papua (BPP), Sekretaris Badan Pengarah Papua (BPP) dan Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP) dalam monitoring kegiatan BPP/BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya.